



# LKjIP

## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2023



**RUMAH TAHANAN NEGAR KELAS II B BUNTOK TA.2023**



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TENGAH**  
**RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B BUNTOK**

*Jl.Pahlawan Km.5 Buntok, email: [rutanbuntok@gmail.com](mailto:rutanbuntok@gmail.com)*

Nomor : W17.PAS.PAS11 - PR.03 - 05

03 Januari 2023

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Hal : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Tahun 2023

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan HAM Kalimantan Tengah  
di-  
Palangka Raya

Menindaklanjuti Surat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah Nomor W.17-PR.03-382 Tanggal 04 Desember 2023 Hal Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023, dengan ini disampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah TA. 2023 Satker Rumah Tahanan Negara Kelas II B Buntok yang telah disusun secara sistematis sesuai arahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.



Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**SINARDI**

NIP. 19700724 199103 1 001

# KATA PENGANTAR

Sebagai wujud penerapan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabel serta untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Inpres Nomor 7 tahun 1999, Rumah Tahanan Negara Klas II B Buntok menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP merupakan bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Klas II B Buntok tahun 2023, yang selanjutnya dijabarkan dalam dokumen Penetapan Kinerja.

Setiap tahun, program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana strategis dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kinerja tahunan dan dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Format dan substansi Penetapan kinerja serta LKjIP tahun 2023 telah menyesuaikan dengan aturan terbaru, yaitu Kepmenkumham M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Penyusunan LKjIP telah didukung dengan sistem Pemasarakatan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Monitoring dan Evaluasi Rencana Kegiatan Tahunan, sedangkan pengelolaan data keuangan didukung dengan modul General Ledger dan Pelaporan (GLP), Aset, dan Persediaan BMN melalui SAKTI Web kemenkeu.

Kami menyadari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) jauh dari sempurna masih terdapat beberapa indikator kinerja program yang belum mencapai target dan masih perlu mendapat perhatian.

Semoga LKjIP Rumah Tahanan Negara Klas II B Buntok Tahun 2023 ini, selain sebagai media pertanggung jawaban atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan, juga dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja, serta memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

Kepala,  


**SINARDI**  
NIP. 19700724 199103 1 001

---

## IKHTISAR EKSEKUTIF

---



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggung jawaban Satuan Kerja Rumah Tahanan Negara Kelas II B Buntok dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah kepada publik atas pelaksanaan mandat konstitusi dan visi misi pimpinan dalam hal ini Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Buntok.

yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RENJA) dan Rencana Setrategis (Renstra) Rumah Tahanan Negara Kelas II B Buntok Tahun 2023-2024 yang terdiri dari 4 (empat) Sasaran Setrategis dan 20 (dua puluh) indicator kinerja utama dibebankan melalui 2 (dua) Program:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
2. Program dukungan Manajemen

Sepanjang Tahun 2023, Rumah Tahanan Negara Kelas II B Buntok telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai target kinerja dalam rangka mendukung agenda Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah dengan pagu anggaran awal yang terdapat di Unit Pelaksana Teknis Rumah Tahanan Negara Kelas II B Buntok sebesar Rp 5.982.378.000,- .

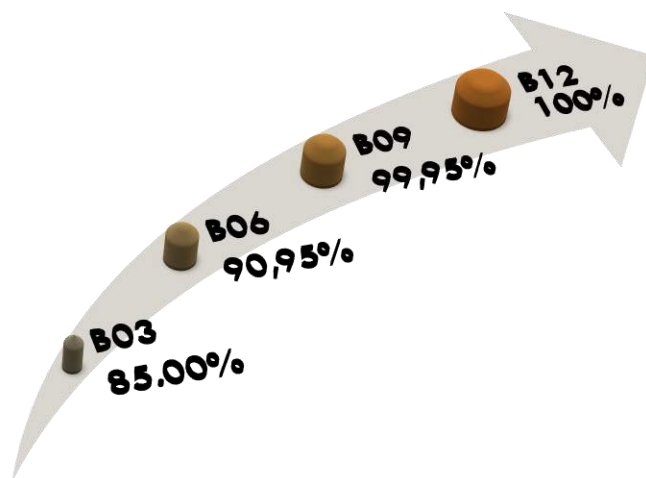


Unit Pelaksana Teknis	Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Revisi	Anggaran Akhir	Anggaran Realisasi	Anggaran Komitmen	Anggaran Pelaksanaan	Anggaran Penyerahan	Anggaran Realisasi	Anggaran Komitmen	Anggaran Pelaksanaan	Anggaran Penyerahan	Anggaran Realisasi
RUTAN KELAS II B BUNTOK	RUANG	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
	RUANG	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
RUANG	RUANG	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
	RUANG	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000

Pergantian Kepala RUTAN pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Buntok mengharuskan ada penyesuaian khususnya penarikan dana dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan, karena harus merubah kegiatan yang telah di rencanakan di awal Tahun 2023. Walaupun demikian hasil baik IKPA tetap dimaksimalkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 98,06. Sedangkan untuk nilai SMART Kementerian Keuangan (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) yaitu 95.76 dengan predikat sangat Baik.



Capaian kinerja untuk tiap sasaran kegiatan yang terdapat dalam perjanjian kinerja Tahun 2023 rata-rata telah tercapai diatas target yang telah ditetapkan dan ditandatangani pada awal Tahun 2023 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Buntok dengan Kepala Devisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah. Dalam upaya pemenuhan target kinerja banyak kendala yang dihadapi namun dengan kerja sama dan dukungan berbagai pihak kendala yang dimaksud berhasil di selesaikan dan capaian target kinerja per TW menunjukkan hasil yang maksimal dengan rata-rata B03-B12 adalah 90% dengan target pada TW selanjutnya B09-BO12 sebagai berikut.



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	2
C. Maksud dan Tujuan .....	5
D. Aspek Setrategis .....	6
E. Isu Setrategis/ Permasalahan Organisasi .....	7
F. Sistematika Laporan .....	8
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....</b>	<b>9</b>
A. Rencana Setrategis.....	9
B. Perjanjian Kinerja .....	17
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>20</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	20
B. Realisasi Anggaran .....	43
C. Capaian Kinerja Anggran .....	43
D. Capaian Kinerja Lainnya .....	45
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>47</b>
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran .....	48
<b>LAMPRAN .....</b>	<b>v</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Rumah Tahanan Negara Kelas II B Buntok merupakan salah satu unit pelaksana teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Pemasyarakatan. Sebelumnya Rutan Buntok adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas III dan Pada tahun 1985 berubah fungsi menjadi Rutan Kelas II B Buntok sampai dengan sekarang. Rutan Kelas II B Buntok sebagai tempat tahanan yang sedang menjalani proses hukum dan Narapidana yang sedang menjalani proses sisa pidananya. Perlu melakukan langkah-langkah sistematis secara akuntabel. Keadaan menu makanan, sarana dan prasarana yang belum memadai merupakan sebagian gambaran kondisi kehidupan tahanan / narapidana. Rumah tahanan negara kelas II B Buntok dengan segala keterbatasan selalu berusaha untuk memenuhi Standar pelayanan sesuai dengan Ratifikasi SMR ( Standar Minimum Rule for treatment of ofender ) yang dikeluarkan PBB sebagai Instrument Internasional yang mengatur tentang standar fasilitas, peraturan narapidana dan tata cara pembinaan dan perlakuan oleh petugas. Apapun kondisinya Rutan Kelas II B Buntok berusaha melakukan pelayanan dan perawatan tahanan serta pembinaan terhadap narapidana tanpa melihat perbedaan sosial, begitu juga dalam melakukan penanganan keamanan Rutan Buntok mengutamakan Hak Asasi Manusia dengan menerapkan tata tertib disiplin tanpa kekerasan. Disamping itu juga Rutan Kelas II B Buntok selalu berusaha agar dapat tertib administrasi sehingga terselenggaranya kenaikan pangkat, pembayaran gaji, tunjangan sampai dengan pengusulan promosi terhadap pegawainya untuk menunjang peningkatan kinerja secara berkesinambungan.



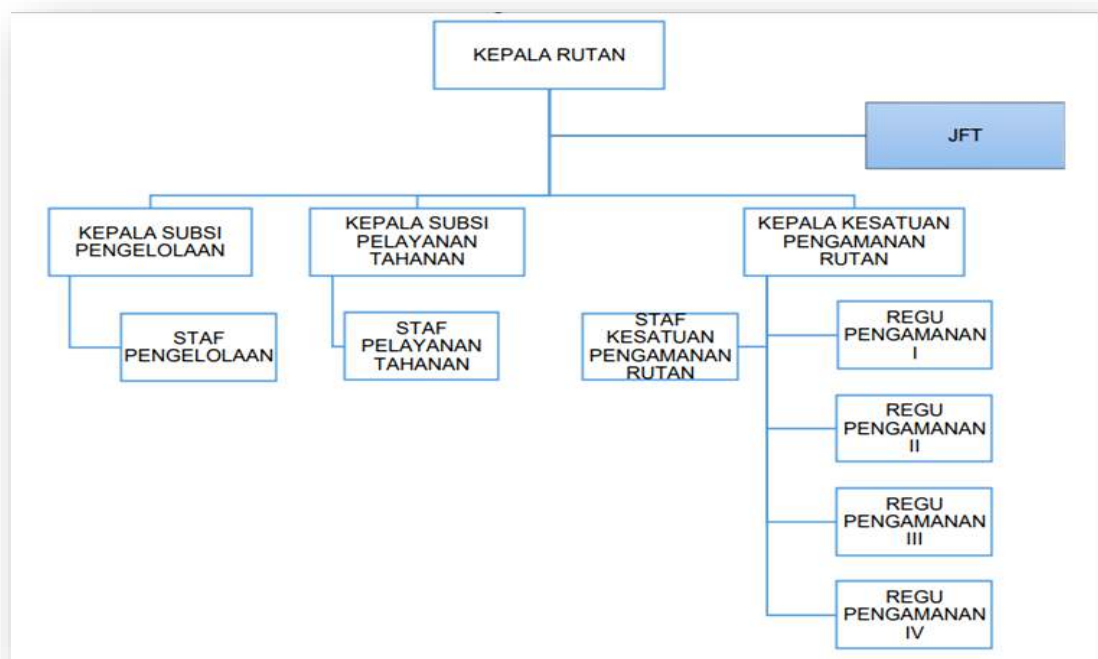
## B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pemasyarakatan, Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM R.I No. 03.PR.07.03 Tahun 1985 tertanggal 20 September 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Rumah Tahanan Negara Berkedudukan Sebagai Unit Pelaksana Teknis yang Melaksanakan Tugas Pokok Departemen Hukum dan HAM R.I. Seiring perkembangan, Berdasarkan pada SE Dirjen Pemasyarakatan Nomor PAS1152.PK.01.01.02 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Tata Kelola Sistem Pemasyarakatan Optimalisasi Penempatan Narapidana di Rumah Tahanan Negara dari 24 Bulan Menjadi 12 Bulan, sehingga dalam melaksanakan tugas tersebut Rumah Tahanan Negara bisa berfungsi sebagai Lapas. berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan pelayanan tahanan dan pengelolaan Rumah Tahanan;
2. Melakukan Pemeliharaan Keamanan dan ketertiban Rumah Tahanan;
3. Melakukan urusan tata usaha Rumah Tahanan Negara;
4. Memberikan pembinaan kepada narapidana kurang dari 1 tahun;
5. Memberikan hak-hak kepada narapidana.

### ✚ Organisasi dan Personalia

Struktur Organisasi Rutan Kelas II B Buntok.





Rumah Tahanan Negara kelas II B Buntok merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, secara geografis terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Barito Selatan yang artinya UPT. Rutan Kelas II B Buntok meliputi wilayah kerja pada cakupan kabupaten Barito Selatan bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah Daerah Barito Selatan dalam Pembinaan dan Pelayanan Hukum bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di daerah.

Susunan Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok terdiri dari Kepala yang membawahi 3 (tiga) Sub Seksi sebagai berikut:

• **Kepala Sub Seksi Pengelolaan**

Kepala Subsi Pengelolaan bertanggung jawab atas pengelolaan dukungan manajemen, pengelolaan kepegawaian, dan selama pandemi Covid-19 ini melakukan dukungan pencegahan dan penanganan Covid-19 di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Buntok. Kepala Subsi Pengelolaan membawahi beberapa unit kerja, antara lain:

a) Unit Keuangan

Bertugas melaksanakan administrasi perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembayaran gaji pegawai, penatausahaan keuangan dan pelaporan keuangan dalam rangka pelayanan administratif dan fasilitatif atau dukungan manajemen Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok.

b) Unit Kepegawaian

Bertugas melaksanakan pengajuan usulan formasi pegawai, KARPEG, KARIS, KARSU, KIS, TASPEN, menyiapkan daftar urut kepangkatan, bazetting, bahan pengajuan usulan mutasi, promosi jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, usulan penghargaan, hukuman disiplin, pensiun dan pelantikan/pengambilan sumpah pegawai/pejabat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercapai tertib administrasi kepegawaian, selain itu juga bertanggung jawab atas pengelolaan kinerja pegawai melalui aplikasi SIMPEG.

c) Unit Tata Usaha

Bertugas melaksanakan pengelolaan persuratan Kantor serta Ketatausahaan Kantor yang dioperasikan secara tertulis dalam kertas dan secara digital melalui aplikasi Sisumaker.

- **Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan**

Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan Membawahi beberapa unit kerja, antara lain:

- a) Unit Registrasi

Petugas melakukan pendaftaran, pengambilan sidik jari, pemberian nomer registrasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam hal ini adalah tahanan baru, mencatat dan menyimpan barang-barang milik tahanan tersebut, mencatat pentahapan pelaksanaan hukuman WBP yang telah vonis atau yang dalam hal ini adalah narapidana/anak didik dan pengusulan pemberian pemotongan hukuman (remisi) serta melakukan proses administrasi pemindahan narapidana dan pemulangan narapidana yang bebas.

- b) Unit Perawatan Tahanan

Bertugas melakukan penyiapan dan pemberian makan, minum, dan pakaian serta perlengkapan bagi narapidana/anak didik, mengatur jadwal petugas penyiapan dan pemberian makan dan minum dan pengawasan narapidana yang bertugas dalam proses penyiapan dan pemberian makan dan minum.

- c) Unit Pendidikan Dan Kesehatan

Bertugas melakukan pemeriksaan kesehatan bagi narapidana baru dan pelayanan kesehatan bagi narapidana, melakukan pemeriksaan badan, lingkungan, pengobatan secara berkala kepada narapidana, melakukan rujukan bagi narapidana yang sakit dan harus dirawat di Rumah Sakit luar Rumah Tahanan Negara mengatur dan mengawasi jadwal olahraga, perpustakaan, rekreasi serta yang berhubungan dengan pendidikan baik formal maupun non formal, bimbingan mental rohani dan keagamaan bagi penghuni dan anak didik pemasyarakatan.

- **Kepala Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara**

Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Membawahi Unit Kerja, sebagai berikut yaitu:

- a) Unit Keamanan

- 1) Menyusun konsep jadwal tugas pengamanan napi.

- 2) Membuat surat permohonan penggunaan perlengkapan pengamanan.
  - 3) Membuat konsep surat permohonan ijin dan perpanjangan pemakaian senjata api.
  - 4) Memelihara perlengkapan/perawatan sarana dan prasarana pengamanan.
  - 5) Mencatat administrasi pelanggaran narapidana/anak didik.
  - 6) Mencatat administrasi pelaksanaan pengawalan bagi narapidana yang keluar Rumah Tahanan Negara dengan alasan tertentu.
  - 7) Mencatat administrasi dan menindaklanjuti Pengaduan.
  - 8) Melaksanakan unit intelijen masyarakat.
  - 9) Membuat pelaporan terkait keamanan dan ketertiban.
- b) Regu Pengamanan
- 1) Penerimaan, pendaftaran, dan penempatan tahanan.
  - 2) Penerimaan, pendaftaran, dan penempatan tahanan di luar jam kerja.
  - 3) Pelaksanaan masa pengenalan, pengamatan dan penelitian lingkungan (mapenaling).
  - 4) Mengumpulkan surat-surat dari tahanan yang akan dikirim kepada pihak luar dan menyerahkan kepada Pelayanan Tahanan.
  - 5) Bertanggung jawab terhadap pengamanan Rumah Tahanan Negara dari segala bentuk gangguan Kamtib. 6) Bertanggung jawab terhadap keamanan alat bantu kamtib yang berada dalam kewenangannya dan alat bantu yang berada dalam lokasi tempat tugasnya.
  - 6) Pembukaan dan penutupan kamar hunian WBP.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini bermaksud sebagai evaluasi bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah secara Umum dan Satker RUTAN Kelas II B Buntok secara Khusus. Yang bertujuan meningkatkan Kinerja Kementerian yang ada di wilayah.

Dasar Hukum:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja, Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.01-PR.07.10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 4) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.29 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.M.HH.01.PR.01.01 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2017-2019.
- 7) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No Kep/135/M.PAN/9/2004 Tentang Pedoman Umum Evaluasi LKjIP.
- 8) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.M.HH-09.07.02.01 Tahun 2011 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2017-2019.
- 9) Kepmenkumham M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

#### **D. Aspek Strategis**

Rumah Tahanan Negara Kelas II B Buntok sebagai UPT yang berada dibawah wilayah kerja kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM khususnya melaksanakan tugas di bidang Pemasarakatan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksana kebijakan dibidang Pemasarakatan di Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan;

- 2) Pelaksana tugas, Pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Daerah;
- 3) Pelaksana dukungan yang bersifat Substantif kepada seluruh unsur organisasi di Daerah:
- 4) Pengelolaan Barang Milik Negara yang menjadi tanggung jawab UPT. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok; dan
- 5) Pelaksana kegiatan teknis pemasyarakatan yang bersekala Daerah.

#### **E. Isu Setrategis/ Permasalahan Organisasi**

Dalam melaksanakan tugasnya, Rutan Buntok dalam memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Rutan Buntok juga mempunyai permasalahan yang harus dicermati sehingga tidak mengganggu upaya kementerian dalam menjamin manfaat program di bidang Hukum dan HAM dirasakan oleh masyarakat. Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi Rutan Buntok adalah sebagai berikut:

- Kurangnya sarana prasarana;
- Masyarakat pengguna layanan yang belum seluruhnya menguasai teknologi;
- Kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban WBP;
- Kurangnya SDM;
- Over crowded WBP;
- Minimnya alokasi anggaran;
- Bangunan kurang memadai;

## F. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas II B Buntok Tahun 2023 berpedoman pada Kepmenkumham M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

<b>KATA PENGANTAR</b>	Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja tahun 2023
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, permasalahan / isu strategis Menjelaskan Visi, Misi, Dokumen Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Anggaran Tahun 2023
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA</b> Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Rumah Tahanan Negara Kelas II B Buntok, meliputi Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b> Menguraikan analisis pencapaian kinerja Lembaga, menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/ kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil.
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas II B Buntok dan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan di masa mendatang.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Rencana strategis adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan kejelasan arah dan tujuan suatu satuan kerja dan merupakan suatu proses berkelanjutan untuk memperbaiki kinerjanya. Rencana strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun (2020-2024) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2020- 2024. Di dalam Rencana Strategis tersebut, tercantum Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Program Penyelenggaraan Pemasarakatan yang diadopsi langsung dari Renstra Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Sebagai langkah awal, untuk dapat mencapai keberhasilan pembangunan dibidang Pemasarakatan periode tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Pemasarakatan menetapkan visi, misi, nilai-nilai, tujuan dan sasaran sebagai berikut:

##### **1) Visi**

Dalam rangka mendukung terwujudnya Visi Presiden secara umum, dan Visi Direktorat Jenderal Pemasarakatan khususnya, maka ditetapkan Visi Rumah Tahanan Negara Kelas II B Buntok Tahun 2020-2024 yaitu;

**”Sumber Daya Manusia yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan untuk Mewujudkan sosial yang lebih baik di masyarakat”**

Setiap aktifitas yang dilakukan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas II B Buntok harus dilakukan secara Profesional dalam kerangka membentuk Warga Binaan Pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila Rumah Tahanan Negara Kelas II B Buntok mampu menjadi institusi yang Profesional, serta didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi.



## 2) Misi:

Misi instansi pemerintah dirumuskan sebagai sesuatu yang jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dan peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih. Perumusan misi instansi pemerintah dilakukan dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategik. Rumusan misi dimaksudkan untuk mampu: (a) melingkupi semua pesan yang terdapat dalam visi; (b) memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai; (c) memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani oleh instansi pemerintah; dan (d) memperhitungkan berbagai masukan dan stakeholders.

Rumah Tahanan Negara Kelas II B Buntok melaksanakan 6 (enam) misi Presiden dan Wakil Presiden secara khusus dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan secara khususnya dengan uraian sebagai berikut:

- Mewujudkan peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas;
- Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
- Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
- Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM;
- Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM;serta
- Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas.

## 3) Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan juga dimaksudkan sebagai kerangka dasar serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan. Tujuan diartikan sebagai sesuatu (apa) kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isuisu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetap harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka

merealisasikan misi. Menjabarkan misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, maka tujuan pembangunan pemasyarakatan adalah:

- a) Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, yaitu Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar Menjadi Manusia Seutuhnya, Menyadari Kesalahan, Memperbaiki Diri, Tidak Mengulangi Tindak Pidana Sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta Memberikan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Tahanan yang Ditahan serta Keselamatan dan Keamanan Benda-Benda yang Disita untuk Keperluan Barang Bukti dan Benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.
- b) Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Kemanan Melalui Peran Pemasyarakatan, yaitu Menciptakan Kondisi UPT Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib;
- c) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yaitu:
  1. Terjaganya Derajat Kesehatan Tahanan dan Narapidana;
  2. Optimalnya Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan;
  3. Mengembangkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan Berbasis Teknologi Informasi.
- d) Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi yaitu Meningkatkan Kinerja Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

#### **4) Sasaran**

Sasaran program pemasyarakatan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai suatu outcome/dampak dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan Hukum dan HAM. Sasaran Program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

##### **a. Stakeholders Perspective (Perspektif Pemangku Kepentingan)**

Sasaran program pada perspektif ini merupakan outcome yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Sasaran Program yang pertama (SP-1) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan

yang Mampu Menjadi Pendorong Inovasi dan Kreativitas dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional”, dengan indikator kinerja :

- 1) Persentase Menurunnya Residivis; (%);
- 2) Persentase Klien Pemasarakatan yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Guna (%):
- 3) Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kuantitas Dan Kualitasnya (Nilainya) (%);
- 4) Persentase Tahanan Mendapatkan Perlindungan Dan Perawatan (%).

Sasaran Program yang kedua (SP-2) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak dan Klien Pemasarakatan”, dengan Indikator Kinerja :

- 1) Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana (Indeks)
- 2) Indeks Pemenuhan Hak Narapidana (Indeks)
- 3) Indeks Keberhasilan Program Pembinaan Klien Pemasarakatan (Indeks)
- 4) Indeks Pengelolaan Basan Baran (Indeks)
- 5) Indeks Pelayanan Tahanan (Indeks)

#### **b. Customer Perspective (Perspektif Penerima Layanan)**

Pada perspektif ini, merupakan kondisi yang diharapkan oleh penerima layanan yakni tahanan, pemilik basan baran, narapidana, Anak dan klien pemasarakatan. Pada Perspektif Customer Direktorat Jenderal Pemasarakatan memetakan 2 (dua) Sasaran Program yang akan dicapai. Sasaran Program ketiga (SP-3) adalah “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas”, dengan Indikator Kinerja :

- 1) Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan (indeks)
- 2) Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan (indeks)
- 3) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan (indeks)
- 4) Indeks Parameter Derajat Kesehatan narapidana, Anak, dan Tahanan (indeks).

Sasaran Program Yang Keempat (SP-4) adalah “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Aman dan Tertib”, dengan Indikator Kinerja : 1) Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan (indeks)

### **c. Internal Process Perspective (Perspektif Proses Bisnis Internal)**

Sasaran strategis pada perspektif ini adalah merupakan proses yang harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Program yang akan dicapai. Sasaran Program kelima (SP5) adalah “Tersedianya Kebijakan Pembangunan Pemasyarakatan Yang Efektif, dengan indikator kinerja :

Indeks Efektifitas Kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (indeks) Sasaran Program Yang Keenam (SP-6) adalah “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM”, dengan indikator kinerja :

- 1) Persentase Rumah Tahanan Negara yang melaksanakan Pelayanan Tahanan Sesuai Standar (%).
- 2) Persentase Rupbasan yang melaksanakan Pengelolaan Basan Baran Sesuai Standar (%).
- 3) Persentase Lapas yang melaksanakan Pembinaan Narapidana Sesuai Standar (%)
- 4) Persentase Bapas yang melaksanakan Pembimbingan Klien Sesuai Standar (%)
- 5) Persentase LPKA yang melaksanakan pemenuhan hak Anak sesuai standar (%).
- 6) Persentase Rumah Tahanan Negara, Lapas, dan LPKA yang melaksanakan perawatan kesehatan sesuai standar (%)
- 7) Jumlah Lapas Supermaksimum dan Maksimum Security yang memenuhi standar pengamanan dan keamanan (%)

Sasaran Program yang Ketujuh (SP-7) adalah Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Partisipatif dengan indikator kinerja:

- 1) Nilai Maturitas SPIP
- 2) Persentase Penyelesaian Pengaduan

### **d. Learning & Growth Perspective (Perspektif Pembelajaran dan Tumbuh)**

Sebagai input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, terdapat 4 (empat) sasaran program yang akan dicapai. Sasaran Program

kedelapan (SP-8) yaitu “Terwujudnya SDM Pemasarakatan yang Kompeten, Profesional dan Berintegritas”, dengan indikator kinerja:

1) Presentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan.

Sasaran Program Yang Kesembilan (SP-9) yaitu “Tersedianya Sistem Informasi dan Layanan Berbasis IT yang Handal dan Terintegrasi”, dengan indikator kinerja :

a) Jumlah Pengembangan Layanan Pemasarakatan Yang Berbasis IT.

Sasaran Program yang Kesepuluh (SP-10) yaitu, “Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan”, dengan indikator kinerja :

1) Jumlah UPT Pemasarakatan Yang Melaksanakan Kerja Sama Sesuai Dengan Standar

2) Persentase kerjasama pemasarakatan yang ditindaklanjuti melalui MOU, PKS ataupun bentuk naskah kerjasama lain

Sasaran Program Yang Kebelas (SP-11) yaitu “Terwujudnya Birokrasi Pemasarakatan yang Efektif dan Berorientasi pada Layanan Prima”, dengan indikator kinerja:

- Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (RB).
- Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Nilai SPIP Sasaran Program Yang Kedua belas (SP-12) yaitu “Terkelolanya Keuangan Secara Efisiensi dan Akuntabel Melalui Shareholder Value”, dengan indikator kinerja :

a. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Pemasarakatan (SMART Kemenkeu);

b. Nilai IKPA;



e. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2023

Pada peta strategi 2020-2024 di atas menjelaskan bahwa, pada tahun 2022 berpacu pada peta strategis 2020-2024. Tujuan utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah ” Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar Menjadi Manusia Seutuhnya, Menyadari Kesalahan, Memperbaiki Diri, Tidak Mengulangi Tindak Pidana Sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta Memberikan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Tahanan yang Ditahan serta Keselamatan dan Keamanan Benda-Benda yang Disita untuk Keperluan Barang Bukti dan Benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negaraberdasarkan putusan pengadilan. Adapun untuk mendukung tujuan utamanya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah memetakan tujuantujuan yang akan mendukung pencapaian tujuan utama yakni : Menciptakan Kondisi UPT Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib; Menjaga Derajat Kesehatan Tahanan dan Narapidana; Mengoptimalkan Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan; Mengembangkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan Berbasis Teknologi Informasi; Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi.

Dalam upaya mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus memastikan setiap unit eselon II bersinergi menjalankan tugas dan fungsi masing- masing secara optimal. Hal ini tergambar pada perspektif internal yang menitik beratkan pada peningkatan kualitas pelayanan pemasyarakatan dengan disusunnya standar Pemasyarakatan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga menentukan dukungan sumber daya yang diperlukan setiap unit yang berupa sumber daya teknologi, sumber daya manusia, iklim organisasi yang kondusif serta sumber daya anggaran seperti yang tergambar pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan serta keuangan pada peta strategi di atas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, menjelaskan bahwa Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat

memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik. Di samping itu, pengukuran IKU juga akan memberikan informasi ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Menindaklanjuti hal tersebut, Direktorat Jenderal Pemasarakatan menetapkan IKU Tahun 2023 pada program penegakan dan pelayanan hukum dibidang Pemasarakatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2023
SS3	Memastikan Pelayanan Publik Di Bidang Hukum Sesuai Dengan Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	Indeks	75
SS4	Memastikan Penegakkan Hukum Yang Mampu Menjadi Pendorong Inovasi Dan Kreativitas Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional	1	Persentase Klien Pemasarakatan yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Guna	%	40%
		2	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)	%	60%
		3	Persentase menurunnya residivis	%	1%
		4	Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan	%	70%
SS5	Ikut Berperan Serta Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Kedaulatan NKRI	5	Indeks keamanan dan keteriban UPT Pemasarakatan	Indeks	70



## **B. Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja Perjanjian kinerja pada UPT Pemasarakatan merupakan cerminan suatu tekad dan janji antara pimpinan UPT Pemasarakatan sebagai penerima amanah / tanggung jawab kinerja dan Direktur Jenderal Pemasarakatan sebagai pihak yang memberikan amanah / tanggung jawab kinerja melalui Kepala Kantor Wilayah. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang harus diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh UPT Pemasarakatan dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Berikut akan diuraikan Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2023.

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur, tertentu, berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Berikut Indikator Kinerja Kegiatan yang bersumber pada Perjanjian Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok Tahun 2023:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan Kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan Kesehatan maternal	97%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%

		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan	1 Layann
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah Gedung/Bangunan	1 Unit

**Table Anggaran Perjenis Kegiatan**

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>Rp. 1.753.659.000,-</b>
Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	Rp. 1.753.659.000,-
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 4.228.719.000,-</b>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT	Rp. 4.228.719.000,-

**Table Anggaran Perjenis Belanja**

Nama Kegiatan	Anggaran
Belanja Pegawai	3.423.590.000,-
Belanja Barang	2.366.688.000,-
Belanja Modal	192.100.000,-
Jumlah	<b>5.982.378.000,-</b>

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Secara umum pengertian kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran dan tujuan, organisasi. Kinerja dapat diketahui dari kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan atau target tertentu yang akan dicapai. Selanjutnya capaian kinerja tersebut perlu diikuti dan dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana sasaran/target organisasi yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Pengukuran kinerja dapat diukur melalui perbandingan antara realisasi/hasil pekerjaan dengan target/sasaran capaian yang telah ditetapkan sebelumnya. Realisasi capaian kinerja sebagai hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian kinerja dengan target/sasaran kinerja dalam satuan persentase.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Kategori Capaian	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kategori Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	99,15%	<b>124% (Tercapai)</b>	80%	99,10%	<b>Tercapai</b>
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	<b>106% (Tercapai)</b>	90%	99,14%	<b>Tercapai</b>
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	0%	<b>0% (Tidak Tercapai)</b> Ket :Tidak terdapat Tahanan/Narapidana perempuan berstatus hamil/menyusui	90%	0%	<b>Tidak Tercapai</b>
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	0%	<b>0% (Tidak Tercapai)</b> Ket :Tidak terdapat yang mengalami gangguan mental	75%	0%	<b>Tidak Tercapai</b>
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	<b>125% (Tercapai)</b>	75%	100%	<b>Tercapai</b>
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai	80%	84,62%	<b>106% (Tercapai)</b>	75%	100%	<b>Tercapai</b>

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Kategori Capaian	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kategori Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	50%	63% (tdk Tercapai)	60%	100%	Tercapai
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	90%	100% (Tercapai)	70%	100%	Tercapai
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	100%	111% (Tercapai)	70%	0%	Tidak Tercapai
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%	100%	111% (Tercapai)	70%	0%	Tidak Tercapai
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100%	111% (Tercapai)	75%	100%	Tercapai
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	125% (Tercapai)	60%	100%	Tercapai
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%	100%	125% (Tercapai)	75%	100%	Tercapai
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	85%	100%	111% (Tercapai)	60%	100%	Tercapai
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100% (Tercapai)	1 Layanan	100%	Tercapai
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	100% (Tercapai)	1 Layanan	100%	Tercapai
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan	1 Layanan	1 Layanan	100% (Tercapai)	1 Layanan	100%	Tercapai
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100% (Tercapai)	1 Layanan	100%	Tercapai
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100% (Tercapai)	1 Layanan	100%	Tercapai
		6. Jumlah Gedung/Bangunan	1 Unit	1 Unit	100% (Tercapai)	-	-	-

Pengukuran kinerja Tahun 2023 dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja Tahun 2023}}{\text{Target Kinerja Tahun 2023}} \times 100\%$$

Laporan kinerja juga menggambarkan alokasi anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Pengukuran capaian realisasi anggaran dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian anggaran dengan pagu alokasi anggaran dalam satuan persentase. Pengukuran capaian realisasi anggaran tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Realisasi Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100\%$$

Berdasarkan sasaran yang tertuang dalam perjanjian kinerja, maka untuk tahun 2023 Rumah Tahanan Negara Kelas II B Buntok telah mencapai sasaran kinerja sebagai berikut :

❖ **Sasaran kegiatan 1**

**Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah.**

Indikator Kinerja Kegiatan 1	Target	Realisasi	capaian
Persentase pemenuhan layanan makan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai standar	80%	99,15%	124%(tercapai)

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{99,15\%}{80\%} \times 100\% = 124\%$$

Sehingga persentase tahanan/narapidana yang menerima layanan makanan sesuai dengan standar adalah **124%**. Pelayanan makanan kepada tahanan dan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok telah berjalan sesuai dengan peraturan dan sudah sesuai standar. Setiap tahanan dan narapidana mendapatkan jatah makanan yang sama satu sama lain dengan kualitas dan kuantitas yang sama juga.



Analisis Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar :

- 1) Target dalam RKAKL TA. 2023 berjumlah 203 Orang namun realisasi hingga Akhir Tahun 2023 hanya terealisasi sekitar 200 Orang (99.15%), Maka dari itu untuk perhitungan dalam rumus maka disesuaikan dengan Target Persentase pada Perjanjian Kinerja Kepala yang Bernilai 80% dari Target yang berjumlah 203 Orang, menghasilkan Target berjumlah 163 Orang (80%);
- 2) Realisasi kinerja pada tahun 2023 dengan tahun 2022 dan Tahun 2021 cenderung turun, hal ini dikarenakan cenderung turunnya jumlah Penghuni (Warga Binaan Pemasarakatan) di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB buntok);
- 3) Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 cenderung konsisten terhadap target jangka menengah maupun Restra yang telah disusun;
- 4) Tercapainya target kegiatan ini tidak lepas dari Perencanaan target kinerja yang telah disusun dengan matang, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

Rumah Tahanan Negara Kelas II B Buntok memiliki Subsidi yang membidangi Pelayanan Tahanan dimana semua Tahanan/Narapidana/anak yang menjadi warga Binaan Pemasarakatan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kebutuhan dasar seperti Pemenuhan makan dan minum bagi Warga Binaan Pemasarakatan dilakukan tiga kali dalam satu hari selama tiga ratus enam puluh lima hari dalam satu Tahun dengan menu makan yang telah di setandakan, pemenuhan perlengkapan mandi, dan kebutuhan sandang, selain itu juga Warga Binaan Pemasarakatan mendapat perawatan Kesehatan seperti obat-obatan yang bisa didapat pada Klinik Rutan Buntok dimana pada klinik tersebut di tugaskan satu tenaga medis Perawat dengan latar belakang Pendidikan Serjana I Keperawatan yang bertanggung jawab memperhatikan Kesehatan Warga Binaan Pemasarakatan, selain itu juga kunjungan dokter dan tenaga medis lain (external) yang dilakukan rutin dua kali dalam sebulan.

Indikator Kinerja Kegiatan 2	Target	Realisasi	capaian
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan	94%	100%	106%(tercapai)

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{100\%}{94\%} \times 100\% = 106\%$$



Sehingga Persentase capaian Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas adalah 106%. Kegiatan layanan kesehatan kepada WBP telah dilaksanakan melalui pemeriksaan kesehatan secara rutin oleh Tenaga Medis dari Klinik Buntok mulai Januari 2023 serta penyuluhan kesehatan oleh JFT yaitu Perawat Maria Patricia, serta kegiatan rutin lainnya seperti pemenuhan makan yang layak, pemberian multivitamin dan masker, layanan pemeriksaan rutin, dan petugas on call apabila ada yang mengeluh sakit. Pada pelaksanaannya, hal ini berhasil mencegah keadaan gawat darurat kondisi kesehatan tahanan/narapidana sehingga Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok berhasil mengendalikan kondisi kesehatan dengan baik.



Analisis Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas :

- 1) Target dalam RKAKL TA. 2023 berjumlah 203 Orang namun realisasi hingga Akhir Tahun 2023 terealisasikan sekitar 203 Orang (100%), Maka dari itu untuk perhitungan dalam rumus maka disesuaikan dengan Target Persentase pada Perjanjian Kinerja Kepala yang Bernilai 94% dari Target yang berjumlah 203 Orang, menghasilkan Target berjumlah 203 Orang (100%);
- 2) Realisasi kinerja pada tahun 2023 dengan tahun 2022 dan Tahun 2021 cenderung tetap, hal ini dikarenakan target yang ditetapkan sudah direncanakan dengan matang;
- 3) Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 cenderung konsisten terhadap target jangka menengah maupun Restra yang telah disusun;

- 4) Tercapainya target kegiatan ini tidak lepas dari Perencanaan target kinerja yang telah disusun dengan matang, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik serta dengan adanya penambahan Pegawai JFT Kesehatan (Perawat).

Indikator Kinerja Kegiatan 3	Target	Realisasi	capaian
Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	94%	0%	0% (tdk tercapai)

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{0 \text{ orang}}{1 \text{ orang}} \times 100\% = 0\%$$

Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal adalah 0%. Kegiatan ini tidak tercapai dikarenakan tidak terdapat Tahanan/Narapidana Perempuan yang hamil atau menyusui pada periode bulan Januari s.d. Desember 2023.

Analisis Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal :

- 1) Target dalam RKAKL TA. 2023 berjumlah 1 Orang namun realisasi hingga Akhir Tahun 2023 hanya terealisasikan 0 Orang,
- 2) Realisasi kinerja pada tahun 2023 dengan tahun 2022 dan Tahun 2021 cenderung tetap, hal ini dikarenakan target yang ditetapkan sudah direncanakan dengan matang;
- 3) Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 cenderung konsisten terhadap target jangka menengah maupun Restra yang telah disusun;
- 4) Tidak tercapainya target kegiatan ini disebabkan karena tidak adanya Tahanan/Narapidana Perempuan yang hamil atau menyusui pada periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2022. Namun tetap di Targetkan sebanyak 1 Orang sebagai upaya preventif (berjaga-jaga) jika nantinya terdapat Tahanan/Narapidana Perempuan yang masuk.

Untuk peningkatan dalam pelayanan kepada Tahanan/Narapidana/Anak Rutan Buntok dibawah Sub Bidang Pelayanan Tahanan maka ada beberapa Langkah strategis antara lain mengantisipasi Overstaying Tahanan yang belum menerima surat perpanjangan penahanan baik di tingkat kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan selalu melaksanakan monitoring tentang status masa penahanan terhadap tahanan yang dititipkan baik secara manual ataupun secara system Data Base Pemasarakatan (SDP). selain itu juga Rutan Buntok Bermitra dengan Lembaga Bantuan Hukum untuk Tahanan/Narapidana/Anak menjalani proses hukum mendapat hak seperti Penyuluhan Hukum dan Bantuan Layanan Hukum.

Indikator Kinerja Kegiatan 4	Target	Realisasi	capaian
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	0%	0%(tdk tercapai)

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{0\%}{80\%} \times 100\% = 0\%$$

Sehingga capaian persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani adalah 142%. Pelayanan Tahanan / Narapidana yang mengalami gangguan mental akan ditangani dengan baik oleh tim medis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok dengan memberikan semangat dan motivasi. Pemberian fasilitas rekreasi berupa olahraga kepada tahanan dan narapidana adalah salah satu sarana agar mental mereka tetap terjaga dengan baik. Sampai dengan 31 Desember 2022 ini, tidak terdapat tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental. Analisis Persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani :

- 1) Target dalam RKAKL TA. 2023 berjumlah 1 Orang ( tidak ada Kegiatan tersebut dalam RKAKL) namun realisasi hingga Akhir Tahun 2023 tidak terealisasi.
- 2) Realisasi kinerja pada tahun 2023 dengan tahun 2022 dan Tahun 2021 cenderung tetap, hal ini dikarenakan target yang ditetapkan sudah direncanakan dengan matang;
- 3) Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 cenderung konsisten terhadap target jangka menengah maupun Restra yang telah disusun;

- 4) Tidak tercapainya target kegiatan ini disebabkan karena hanya tidak ada orang tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental 01 Januari s.d. 31 Desember 2023.

Indikator Kinerja Kegiatan 5	Target	Realisasi	capaian
Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	84,62%	106% (tercapai)

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{84,62\%}{80\%} \times 100\% = 106\%$$

Sehingga Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar adalah 125%. Kegiatan ini tercapai dengan melakukan Pemeriksaan rutin, pemberian Extravoeding Lansia berupa Susu Lansia setiap harinya serta perlengkapan penunjang untuk lansia berupa Popok Lansia dan sejenisnya selama periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2022.

Analisis Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar :

- 1) Target dalam RKAKL TA. 2023 berjumlah 4, Maka dari itu untuk perhitungan dalam rumus maka disesuaikan dengan Target Persentase pada Perjanjian Kinerja Kepala yang Bernilai 80% dari Target yang berjumlah 4 Orang, menghasilkan Target berjumlah 3 Orang;
- 2) Realisasi kinerja pada tahun 2023 dengan tahun 2022 dan Tahun 2021 cenderung tetap, hal ini dikarenakan target yang ditetapkan sudah direncanakan dengan matang;
- 3) Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 cenderung konsisten terhadap target jangka menengah maupun Restra yang telah disusun;
- 4) Tercapainya target kegiatan ini disebabkan karena tidak adanya tidak terdapat tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental 01 Januari s.d. 31 Desember 2023.

Indikator Kinerja Kegiatan 7	Target	Realisasi	capaian
Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	50%	63% (tercapai)

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{50\%}{80\%} \times 100\% = 63\%$$

Sehingga Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) 50%. Kegiatan ini tercapai dengan memberikan dan perawatan kesehatan rutin serta mencegah penyebaran Penyakit Menular tersebut dengan melakukan Isolasi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengidap penyakit tersebut serta dilakukan tindakan pengobatan berkala serta pemantauan (observasi) rutin.

*Rekapitulasi tahanan/narapidana/anakyang teridentifikasi memiliki Penyakit Menular  
(HIV-AIDS dan TB Positif) Tahun 2023*

No	Jenis Penyakit Menular	Jumlah	Layanan
1	TB	1 Orang	Layanan Kesehatan
2	HIV-Aids	0 Orang	

Analisis Sehingga Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh):

- 1) Target dalam RKAKL TA. 2023 berjumlah 1 Orang, Maka dari itu untuk perhitungan dalam rumus maka disesuaikan dengan Target Persentase pada Perjanjian Kinerja Kepala yang Bernilai 50% dari Target yang berjumlah 2 Orang, memenuhi Target berjumlah 1 Orang;
- 2) Realisasi kinerja pada tahun 2023 dengan tahun 2022 dan Tahun 2021 cenderung tetap, hal ini dikarenakan target yang ditetapkan sudah direncanakan dengan matang;
- 3) Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 cenderung konsisten terhadap target jangka menengah maupun Restra yang telah disusun;

- 4) Tercapainya target kegiatan ini disebabkan karena perhitungan perencanaan target kinerja yang matang serta adanya penambahan JFT Tenaga Kesehatan (Dokter dan Perawat).

❖ **Sasaran 2**

**Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar**

Indikator Kinerja Kegiatan 1	Target	Realisasi	Kategori
Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	90%	<b>100% (Tercapai)</b>

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{90\%}{90\%} \times 100\% = 100\%$$

Permasalahan pada Unit Pelaksana Teknis di seluruh Indonesia juga dialami UPT. RUTAN Buntok salah satunya Over kapasitas yang pasti berdampak pada Keamanan dan Ketertiban, maka dari itu Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka.KPR) beserta Petugas anggota Jaga yang bertanggung jawab langsung untuk memastikan Keamanan dan Ketertiban RUTAN tetap terjaga melakukan beberapah hal seperti pemindahan Tahanan dan anak ke Lembaga Pemasayrakatan dan Lembaga Peasyarakatan Khusus Anak, guna mengatasi jumlah Warga Binaan Pemasayrakatan yang over kapasitas, Diteksi Dini terhadap Warga Binaan Pemasayrakatan (WBP) penghuni kamar blok Hunian maupun saat kegiatan senam pagi WBP, melakukan Razia rutin Kamar Blok hunian, dan mengisi kegiatan-kegiatan seperti pembinaan kemandirian yang telah di programkan kementerian Hukum dan HAM.

Sehingga capaian Persentase menurunnya tahanan yang overstaying adalah 100%. Kegiatan ini tercapai dikarenakan berjalannya Program Pelayanan Tahanan dengan baik, sehingga Banyak Warga Binaan Pemasayrakatan yang dapat diusulkan pada Program Asimilasi Rumah, PB, CB, CMB maupun Remisi. Hal ini menyebabkan Tidak adanya Status Overstaying pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok sejak 2013.

Analisis Persentase menurunnya tahanan yang overstaying:

- 1) Target berjumlah 203 Orang, Maka dari itu untuk perhitungan dalam rumus maka disesuaikan dengan Target Persentase pada Perjanjian Kinerja Kepala yang Bernilai 100% dari Target yang berjumlah 203 Orang, menghasilkan Target berjumlah 203 Orang;

- 2) Realisasi kinerja pada tahun 2023 dengan tahun 2022 dan Tahun 2021 cenderung tetap, hal ini dikarenakan target yang ditetapkan sudah direncanakan dengan matang;
- 3) Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 cenderung konsisten terhadap target jangka menengah maupun Restra yang telah disusun;
- 4) Tercapainya target kegiatan ini terjadi karena berjalannya Program Pelayanan Tahanan dengan baik, sehingga Banyak Warga Binaan Pemasyarakatan yang dapat diusulkan pada Program Asimilasi Rumah, PB, CB, CMB maupun Remisi. Hal ini menyebabkan Tidak adanya Status Overstaying pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok.

Indikator Kinerja Kegiatan 2	Target	Realisasi	Kategori
Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	100%	<b>111% (Tercapai)</b>

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{100\%}{90\%} \times 100\% = 111\%$$

Sehingga Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum adalah 111%. Kegiatan ini tercapai walaupun tidak adanya Anggaran penunjang untuk kegiatan tersebut namun koordinasi yang baik antara Pemerintah Daerah Barito Selatan dan Satker Rutan Buntok maka hal ini bisa dilaksanakan.



Analisis Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum:

- 1) Target berjumlah 80% dari 60 Orang, Maka dari itu untuk perhitungan dalam rumus maka disesuaikan dengan Target Persentase pada Perjanjian Kinerja Kepala yang Bernilai 80% dari Target yang berjumlah 60 Orang, menghasilkan Target berjumlah 48 Orang;

- 2) Realisasi kinerja pada tahun 2022 dengan tahun 2021 dan Tahun 2020 cenderung tetap, hal ini dikarenakan target yang ditetapkan sudah direncanakan dengan matang;
- 3) Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 cenderung konsisten terhadap target jangka menengah maupun Restra yang telah disusun;
- 4) Tidak tercapainya kegiatan ini dikarenakan tidak terdapat Lembaga/badan bantuan Hukum di Wilayah Hukum Barito Timur yang dapat memfasilitasi kegiatan Penyuluhan Hukum di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok.

Indikator Kinerja Kegiatan 3	Target	Realisasi	Kategori
Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%	90%	<b>100% (Tercapai)</b>

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{100\%}{90\%} \times 100\% = 100\%$$

Bantuan hukum yang dilaksanakan pada satuan kerja merupakan program devisi Yankum kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, dengan teknis pelaksanaan bermitra dengan advokat yang telah ditunjuk dan berkoordinasi dengan satuan kerja, sehingga hal ini bisa terlaksana dan tercapai

Analisis Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum:

- 1) Target berjumlah 90% dari 180 Orang, Maka dari itu untuk perhitungan dalam rumus maka disesuaikan dengan Target Persentase pada Perjanjian Kinerja Kepala yang Bernilai 90% dari Target yang berjumlah 203 Orang, menghasilkan Target berjumlah 180 Orang;
- 2) Realisasi kinerja pada tahun 2023 dengan tahun 2022 dan Tahun 2021 cenderung tetap, hal ini dikarenakan target yang ditetapkan sudah direncanakan dengan matang;
- 3) Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021 cenderung konsisten terhadap target jangka menengah maupun Restra yang telah disusun;
- 4) Tercapainya kegiatan ini dikarenakan terdapat program devisi Yankum yang berkerjasama dengan Lembaga/badan bantuan Hukum di Wilayah Hukum Barito Selatan yang dapat memfasilitasi kegiatan Bantuan Hukum di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok.



### ❖ Sasaran 3

#### Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar

Indikator Kinerja Kegiatan 1	Target	Realisasi	Kategori
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100%	<b>117% (Tercapai)</b>

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{100\%}{85\%} \times 100\% = 117\%$$

Sehingga Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar adalah 100%. Kegiatan ini dapat tercapai berkat dukungan dari Tim Pengaduan dan pihak terkait.

No	Jenis Pengaduan	Jumlah	Layanan
1	Pengaduan Terkait Pelayanan	3 Pengaduan maupun saran	Layanan Kunjungan, dan Layanan Tahanan

Analisis Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar:

- 1) Target berjumlah 2 Pengaduan, maka dari itu untuk perhitungan dalam rumus maka disesuaikan dengan Target Persentase pada Perjanjian Kinerja Kepala yang bernilai 90% dari Target yang berjumlah 3 Pengaduan, menghasilkan Target berjumlah 3 Pengaduan;
- 2) Realisasi kinerja pada tahun 2023 dengan tahun 2022 dan Tahun 2021 cenderung tetap, hal ini dikarenakan target yang ditetapkan sudah direncanakan dengan matang;
- 3) Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 cenderung konsisten terhadap target jangka menengah maupun Restra yang telah disusun;
- 4) Kegiatan ini dapat tercapai berkat dukungan dari Tim Pengaduan (SATOPS PATNAL) dan pihak terkait yang segera menindaklanjuti Laporan dari Masyarakat.

Indikator Kinerja Kegiatan 2	Target	Realisasi	Kategori
Persentase gangguan kamtib Yang dapat dicegah	80%	100%	<b>125% (Tercapai)</b>

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{100\%}{90\%} \times 100\% = 125\%$$

Sehingga Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah adalah 125%. Kegiatan ini dapat tercapai berkat berbagai tindakan pencegahan (Preventif) dengan Mitigasi resiko serta Deteksi Dini Petugas Jaga.

No	Jenis Gangguan Kamtib	Jumlah	Layanan
1	Gangguan Kamtib berupa Peredaran Barang Terlarang (Handphone dan Barang Sajam rakitan)	6	Dapat dicegah dengan baik dengan deteksi dini serta memperkuat kegiatan Intel PAS

Analisis Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah :

Target berjumlah 6 Gangguan Kamtib , Maka dari itu untuk perhitungan dalam rumus maka disesuaikan dengan Target Persentase pada Perjanjian Kinerja Kepala yang Bernilai 80% dari Target yang berjumlah 6 Gangguan Kamtib, menghasilkan Target berjumlah 5 Gangguan Kamtib;



- 1) Realisasi kinerja pada tahun 2023 dengan tahun 2022 dan Tahun 2021 cenderung tetap, hal ini dikarenakan target yang ditetapkan sudah direncanakan dengan matang;
- 2) Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 cenderung konsisten terhadap target jangka menengah maupun Restra yang telah disusun;

- 3) Kegiatan ini dapat tercapai berkat dukungan dari Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara yang selalu melakukan tindakan pencegahan (preventif) dan Razia Hunian secara rutin Maupun Insidentil.
- 4) Kegiatan ini juga menjadi Indikator Penting terkait Peluang Munculnya Gangguan Kamtib di masa yang akan datang, maka dari itu diharapkan P2U maupun Wasrik dapat dilengkapi dengan Sarana Prasarana Pendukung seperti Walktrough Metal Detector dan Mesin X-Ray sehinggian dapat meminimalisir adanya gangguan Kamtib dimasa yang akan datang.

Indikator Kinerja Kegiatan 3	Target	Realisasi	Kategori
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%	100%	<b>125% (Tercapai)</b>

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{100\%}{80\%} \times 100\% = 125\%$$

Sehingga Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib adalah 100%. Kegiatan ini dapat tercapai karena Pembinaan berkelanjutan kepada Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib seperi senam pagi Bersama dan kegiatan ibadah.



Analisis Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib:

- 1) Target berjumlah 203 Orang , Maka dari itu untuk perhitungan dalam rumus maka disesuaikan dengan Target Persentase pada Perjanjian Kinerja Kepala yang Bernilai 90% dari Target yang berjumlah 203 orang, menghasilkan Target berjumlah 180 Orang;
- 2) Realisasi kinerja pada tahun 2023 dengan tahun 2022 dan Tahun 2021 cenderung tetap, hal ini dikarenakan target yang ditetapkan sudah direncanakan dengan matang;
- 3) Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 cenderung konsisten terhadap target jangka menengah maupun Restra yang telah disusun;
- 4) Kegiatan ini dapat tercapai berkat dukungan dari Pelayanan Tahanan dan Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara yang Melakukan Pembinaan serta Pembimbingan Pembimbingan terkait dilarangnya memasukkan Barang Terlarang kedalam Kamar Hunian, serta dilakukan observasi secara berkala.

Indikator Kinerja Kegiatan 4	Target	Realisasi	Kategori
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	85%	100%	<b>117% (Tercapai)</b>

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{100\%}{85\%} \times 100\% = 117\%$$

Sehingga Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas adalah 117%. Kegiatan ini dapat tercapai karena Pembinaan berkelanjutan kepada Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib serta melakukan Razia dan sosialisasi berkala terkait tata tertib kepada Warga Binaan Masyarakat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok.

Analisis Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas:

- 1) Target berjumlah 85% dari 4 Kegiatan Pemulihan Kondisi keamanan , Maka dari itu untuk perhitungan dalam rumus maka disesuaikan dengan Target

Persentase pada Perjanjian Kinerja Kepala yang Bernilai 85% dari Target yang berjumlah Pemulihan Kondisi Keamanan, menghasilkan Target berjumlah 3 Pemulihan Kondisi Keamanan;

- 2) Realisasi kinerja pada tahun 2023 dengan tahun 2022 dan Tahun 2021 cenderung tetap, hal ini dikarenakan target yang ditetapkan sudah direncanakan dengan matang;
- 3) Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 cenderung konsisten terhadap target jangka menengah maupun Restra yang telah disusun;
- 4) Kegiatan ini dapat tercapai berkat dukungan dari Pelayanan Tahanan dan Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara yang Melakukan Pembinaan serta Pembimbingan baik secara jasmani maupun rohani, serta dilakukan observasi secara berkala

❖ **Sasaran Kegiatan 4**

**Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen**

Indikator Kinerja Kegiatan 1	Target	Realisasi	Kategori
Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	<b>100% (Tercapai)</b>

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{1 \text{ Layanan}}{1 \text{ layanan}} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu adalah 1 Layanan (100%). Kegiatan ini dapat tercapai karena tertibnya Pelaporan yang Akuntabel, berkala dan tepat waktu serta Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Anggaran yang diolah dan ditetapkan dengan perencanaan yang matang.



Analisis Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu:

- 1) Target berjumlah 1 Layanan , Maka dari itu untuk perhitungan dalam rumus maka disesuaikan dengan Target Persentase pada Perjanjian Kinerja Kepala yang Bernilai 1 Layanan selama Kurun waktu Tahun 2023.
- 2) Realisasi kinerja pada tahun 2023 dengan tahun 2022 dan Tahun 2021 cenderung tetap, hal ini dikarenakan target yang ditetapkan sudah direncanakan dengan matang;
- 3) Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 cenderung konsisten terhadap target jangka menengah maupun Restra yang telah disusun;
- 4) Kegiatan ini dapat tercapai sesuai target berkat Perencanaan yang matang serta Pendampingan dan sosialisasi dari Kantor Wilayah Kemterian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah terkait Perencanaan maupun Pelaporan.

Indikator Kinerja Kegiatan 2	Target	Realisasi	Kategori
Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	<b>100% (Tercapai)</b>

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{1 \text{ Layanan}}{1 \text{ layanan}} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan adalah 1 Layanan (100%). Kegiatan ini dapat tercapai karena tertibnya Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang secara periodik dilakukan Pemutakhiran Data BMN, Opname fisik, Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal), Perencanaan BMN dan Distribusi terhadap Aset (Intrakomtabel dan Ektrakomtabel) maupun Persediaan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok serta Dilakukan Penatausahaan Kerumah Tanggaan yang baik sehingga menghasilkan pelayanan manajemen internal yang optimal.



Analisis Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan:

- 1) Target berjumlah 1 Layanan , Maka dari itu untuk perhitungan dalam rumus maka disesuaikan dengan Target Persentase pada Perjanjian Kinerja Kepala yang Bernilai 1 Layanan selama Kurun waktu Tahun 2023.
- 2) Realisasi kinerja pada tahun 2023 dengan tahun 2022 dan Tahun 2021 cenderung tetap, hal ini dikarenakan target yang ditetapkan sudah direncanakan dengan matang;
- 3) Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 cenderung konsisten terhadap target jangka menengah maupun Restra yang telah disusun;
- 4) Kegiatan ini dapat tercapai sesuai target berkat Pengelolaan BMN dan Penatausahaan kerumah tanggaan yang baik sehingga menghasilkan pelayanan yang optimal.

Indikator Kinerja Kegiatan 3	Target	Realisasi	Kategori
Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan	1 Layanan	<b>100% (Tercapai)</b>

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{1 \text{ Layanan}}{1 \text{ layanan}} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan adalah 1 Layanan (100%). Kegiatan ini dapat tercapai karena tertibnya pemenuhan Pemutakhiran Data Pegawai dan Usulan Peningkatan Kompetensi Pegawai melalui Diklat Teknis maupun Non Teknis serta Penyelenggaraan Kegiatan FMD ( Fisik Mental dan Disiplin) Pegawai setiap Tahunnya.





Analisis Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan:

- 1) Target berjumlah 1 Layanan , Maka dari itu untuk perhitungan dalam rumus maka disesuaikan dengan Target Persentase pada Perjanjian Kinerja Kepala yang Bernilai 1 Layanan selama Kurun waktu Tahun 2023.
- 2) Realisasi kinerja pada tahun 2023 dengan tahun 2022 dan Tahun 2021 cenderung tetap, hal ini dikarenakan target yang ditetapkan sudah direncanakan dengan matang;
- 3) Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 cenderung konsisten terhadap target jangka menengah maupun Restra yang telah disusun;
- 4) Kegiatan ini dapat tercapai sesuai target karena tertibnya pemenuhan Pemutakhiran Data Pegawai dan Usulan Peningkatan Kompetensi Pegawai melalui Diklat Teknis maupun Non Teknis serta Penyelenggaraan Kegiatan FMD ( Fisik Mental dan Disiplin) Pegawai setiap Tahunnya.

Indikator Kinerja Kegiatan 4	Target	Realisasi	Kategori
Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	<b>100% (Tercapai)</b>

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{1 \text{ Layanan}}{1 \text{ layanan}} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu adalah 1 Layanan (100%). Kegiatan ini dapat tercapai karena tertibnya Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) dan Hal.III, sehingga menghasilkan Nilai IKPA yang Optimal.





Analisis Jumlah Layanan Perkantoran:

- 1) Target berjumlah 1 Layanan , Maka dari itu untuk perhitungan dalam rumus maka disesuaikan dengan Target Persentase pada Perjanjian Kinerja Kepala yang Bernilai 1 Layanan selama Kurun waktu Tahun 2023.
- 2) Realisasi kinerja pada tahun 2023 dengan tahun 2022 dan Tahun 2021 cenderung tetap.
- 3) Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 cenderung konsisten terhadap target jangka menengah maupun Restra yang telah disusun;
- 4) Kegiatan ini dapat tercapai sesuai target karena karena tertibnya Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) dan Hal.III, sehingga menghasilkan Nilai IKPA yang Optimal

Indikator Kinerja Kegiatan 5	Target	Realisasi	Kategori
Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	<b>100% (Tercapai)</b>

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{1 \text{ Layanan}}{1 \text{ layanan}} \times 100\% = 100\%$$

Pemenuhan Gaji dan Tunjangan Pegawai yang diberikan setiap Bulan selama 12 Bulan selama Tahun Anggaran 2023, juga belanja Oprasional Perkantoran ATK, Listrik, jaringan Internet dan Air sebagai pendukung perkantoran terpenuhi selama 12 Bulan Tahun 2023. Untuk kegiatan seperti pembinaan kepada pegawai RUTAN Buntok diadakannya Latihan dasar penggunaan senjata api yaitu Latihan menembak sebagai bentuk kewaspadaan petugas dalam melaksanakan tugas sehari-hari. UPT. Rutan Buntok berkomitmen sebagai Zona Integritas untuk meraih UPT predikat WBK/WBBM di Tahun 2023.

Sehingga Jumlah Layanan Perkantoran adalah 1 Layanan (100%). Kegiatan ini dapat tercapai karena tertibnya Pemenuhan Gaji dan Tunjangan Pegawai di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok serta pelaksanaan operasional dan Pemeliharaan Kantor yang optimal dan tepat guna.

Analisis Jumlah Layanan Perkantoran:

- 1) Target berjumlah 1 Layanan , Maka dari itu untuk perhitungan dalam rumus maka disesuaikan dengan Target Persentase pada Perjanjian Kinerja Kepala yang Bernilai 1 Layanan selama Kurun waktu Tahun 2023.
- 2) Realisasi kinerja pada tahun 2023 dengan tahun 2022 dan Tahun 2021 cenderung tetap, hal ini dikarenakan target yang ditetapkan sudah direncanakan dengan matang;
- 3) Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 cenderung konsisten terhadap target jangka menengah maupun Restra yang telah disusun;
- 4) Kegiatan ini dapat tercapai sesuai target karena tertibnya Pemenuhan Gaji dan Tunjangan Pegawai di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok serta pelaksanaan operasional dan Pemeliharaan Kantor yang optimal dan tepat guna.

Indikator Kinerja Kegiatan 6	Target	Realisasi	Kategori
Jumlah Renovasi dan Rehabilitasi Jaringan Listrik	1 Unit	1 Unit	<b>100% (Tercapai)</b>

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{1 \text{ Unit}}{1 \text{ Unit}} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga Jumlah Renovasi dan Rehabilitasi jaringan Listrik perkantoran (belanja modal gedung dan bangunan) mencapai 100% pada bulan Mei 2023.

Kegiatan ini dapat tercapai karena sangat diperlunya Belanja Modal berupa Saran Internal yaitu peremajaan jaringan listrik, Maka dari itu untuk perhitungan dalam rumus maka disesuaikan dengan Target Persentase pada Perjanjian Kinerja Kepala yang Bernilai 1 Unit (100%) selama Kurun waktu Tahun 2023.

- 1) Realisasi kinerja pada tahun 2022 dengan tahun 2021 dan Tahun 2020 cenderung tetap, hal ini dikarenakan target yang ditetapkan sudah direncanakan dengan matang;
- 2) Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 cenderung konsisten terhadap target jangka menengah maupun Restra yang telah disusun;
- 3) Kegiatan ini dapat tercapai karena sangat diperlunya Belanja Modal berupa Saran Internal yaitu Perangkat Pengolah data dan Komunikasi untuk mendukung Kegiatan Perkantoran.

## Perencanaan Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Target Volume Output	Anggaran
1	Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Layanan Tahanan	203 Orang	Rp 98.289.000,-
2	Persentase Pemenuhan Layanan Makanan dan kebutuhan dasar bagi Tahanan/Narapidana/Anak Sesuai dengan setandar.	Layanan Kebutuhan Dasar WBP	203 WBP	Rp 1.563.949.000,-
3	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapat Layanan Kesehatan secara Berkualitas dan Kebutuhan dasar WBP.	Pemenuhan Kebutuhan Dasar WBP	203 WBP	Rp 39.585.000,-
4	Persentase gangguan Kamtib yang dapat di cegah.	Layanan Keamanan dan Ketertiban	12 Operasi	Rp 51.836.000,-
5	Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran	1 Layanan	Rp 3.423.590.000,-
6	Tersusunnya dokumen rencana kerja, Anggaran UPT Pemasarakatan dan Pelaporan yang Akuntabel Tepat waktu	Dukungan Manajemen Satker (RKA K/L)	1 Layanan	Rp 26.350.000,-
7	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Dukungan Manajemen Belanja Modal Perbaikan Instalasi Listrik	1 Unit	Rp 192.100.000,-
8	Layanan Manajemen SDM	Pembinaan Kepegawaian	54 Pegawai	Rp 25.050.000,-
9	Dukungan Manajemen Lainnya	Dukungan Manajemen	1 Layanan	Rp 75.001.000,-

## B. Realisasi Anggaran

No.	Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Anggaran Tahun 2023	Penyerapan Anggaran Tahun 2023	Persentase Penyerapan Anggaran Tahun 2023
1	Indeks Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	Layanan Tahanan	Rp 98.289.000,-	Rp 93.149.000,-	94.12%
2	Persentase Pemenuhan Layanan Makanan dan kebutuhan dasar bagi Tahanan/Narapidana/Anak Sesuai dengan setandar	Layanan Kebutuhan Dasar WBP	Rp 1.563.949.000,-	Rp 1.552.158.826,-	99.25%
3	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapat Layanan Kesehatan secara Berkualitas.	Pemenuhan Kebutuhan Dasar WBP	Rp 39.585.000,-	Rp 39.585.000,-	100%
4	Persentase gangguan Kamtib yang dapat di cegah.	Layanan Keamanan dan Ketertiban	Rp 51.836.000,-	Rp 51.833.250,-	99,99%
5	Tersusunnya dokumen rencana kerja, Anggaran UPT Masyarakat dan Pelaporan yang Akuntabel Tepat waktu	Dukungan Manajemen Satker	Rp 26.350.000,-	Rp 26.250.000,-,-	99,26%
6	Layanan Perkantoran dan Dukungan Manajemen	Layanan Perkantoran dan Dukungan Manajemen	Rp 4.202.369.000,-	Rp 4.105.537.624,-	97.71%

## C. Capaian Kinerja Anggaran

### 1. Nilai Kinerja Pada Aplikasi SMART DJA

Dalam rangka penerapan penganggaran berbasis Kinerja dan memudahkan Satuan Kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri, Kementerian/Lembaga termasuk juga dalam hal ini Rumah Tahanan Negara Kelas II B Buntok menginput Capaian Kinerja pada aplikasi berbasis *website* Kementerian Keuangan SMART DJA dapat diakses melalui laman

<https://smart.kemenkeu.go.id>. Sub komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 5 Variabel yaitu:

- Capaian Kinerja, Bobot 100
- Penyerapan Anggaran, Bobot 98,96
- Efesiensi, Bobot 14,25
- Nilai Efesiensi, Bobot 85,63
- Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan (Deviasi RPD awal dan akhir), bobot 99,85

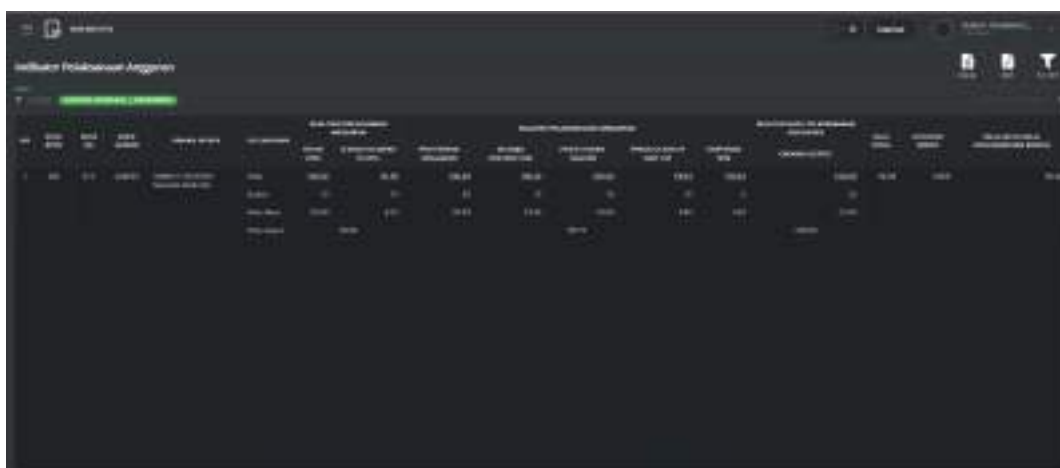


## 2. Nilai IKPA

IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Satuan Kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, Efektivitas Pelaksanaan Anggaran, Efesiensi Pelaksanaan Anggaran, dan kepatuhan terhadap Regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan. Sub komponen penilaian IKPA yaitu :

- Revisi DIPA, bobot 10,00
- Deviasi Halaman III DIPA, bobot 8,20
- Belanja Kontraktual, bobot 10,00
- Penyelesaian Tagihan, bobot 10,00
- Pengelolaan UP dan TUP, bobot 9,86
- Dispensasi SPM, 5,00

- Penyerapan Anggaran, bobot 20,00
- Capaian Output, Bobot 25,00



### **Analisa**

Rumah Tahanan Negara kelas II B Buntok telah merencanakan kegiatan di awal Tahun 2023 dengan anggaran yang telah disediakan kementerian Hukum dan HAM dengan didampingi Koordinator Wilayah Kalimantan Tengah dan Biro Perencanaan Ditjend. PAS. pada awal Tahun 2023 Kementerian Hukum dan HAM khususnya RUTAN Buntok harus melakukan penyesuaian anggaran dengan rencana karena pergantian KPA. Kendala tersebut diatas mengharuskan untuk mengevaluasi rencana kegiatan yang telah dibuat dengan mekanisme revisi anggaran sehingga bisa mengoptimalkan kegiatan yang tertuang dalam DIPA TA.2023. Dalam pelaksanaan kegiatan pula Rutan Kelas II B Buntok sedapat mungkin melakukan pelaporan-pelaporan secara berkala sebagai bentuk pertanggung jawaban Kerja Anggaran Tahun 2023.

### **D. Capaian Kinerja Lainnya**

#### **1) E-Performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**

E-Performance Kementerian Hukum dan HAM adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian Target Kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian

kinerja dan keuangan. Aplikasi e-performance Rumah Tahanan Negara Kelas II B Buntok dapat dilaksanakan melalui laman <https://e-performance.kemenkumham.go.id/index.php> ada pun capaian E-Performance Rumah Tahanan Negara Kelas II B Buntok Tahun 2023 adalah sebagai berikut:



## 2) E-Monev BAPPENAS

Aplikasi e-Monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Rencana Kerja Kementerian/Lembaga). Lebih lanjut, aplikasi e-Monev juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga). Aplikasi e-Monev dapat diakses melalui laman <https://e-monev.bappenas.go.id/2023/home> dengan tampilan sebagai berikut:



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Rumah Tahanan Negara Kelas II B Buntok telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Tahun 2023. LKjIP ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas II B Buntok dilihat dari capaian indikator secara komprehensif sebagai wujud pertanggung jawaban publik (*public accountability*).

LKjIP ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan tahun 2023 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I tahun 2019-2024 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2019-2024. Indikator yang diukur adalah capaian indikator kinerja kegiatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Buntok.

Secara umum, pencapaian kinerja Rumah Tahanan Negara pada Tahun 2023 sudah cukup maksimal. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga.

Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat. Secara umum permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas II B Buntok bisa diselesaikan dan tidak meninggalkan permasalahan yang berarti.



## **B. Saran**

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas maka guna meningkatkan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas II B Buntok khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas SDM Pemasarakatan melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, maupun diklat teknis pemasarakatan.
2. Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran pemasarakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kegiatan-kegiatan teknis pemasarakatan di Rumah Tahanan Negara;
3. Meningkatkan dan menguatkan sistem pengawasan baik terhadap tahanan maupun terhadap petugas pemasarakatan.

Demikian laporan yang disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.

## **LAMPIRAN**

- **Perjanjian Kinerja**
- **DIPA Petikan Awal dan Akhir TA.2023**
- **Laporan Realisasi Anggaran**
- **Foto/Dokumentasi**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B BUNTOK  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sinardi  
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Buntok

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Hendra Ekaputra  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

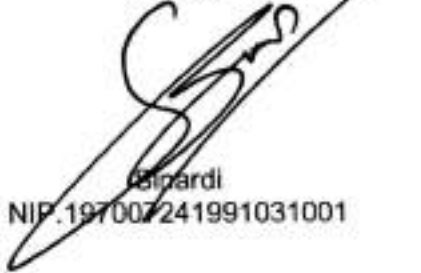
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Tengah

  
Hendra Ekaputra  
NIP.497212241999021001

Pihak Pertama,  
Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B  
Buntok

  
Sinardi  
NIP.197007241991031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B BUNTOK DENGAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
KALIMANTAN TENGAH**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	90%
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan	80

<b>No.</b>	<b>Sasaran Program</b>	<b>Indikator Kinerja Program</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	Indeks Pelayanan Tahanan	80
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	85
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan	85
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan	85
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Masyarakat	Indeks Pelayanan Tahanan	80
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan yang aman dan tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat	80

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	<p>1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar</p> <p>2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas</p> <p>3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal</p> <p>4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani</p> <p>5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</p> <p>6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</p> <p>7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)</p> <p>8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika (Bagi UPT Pelaksana Rehabilitasi, apabila tidak memiliki target rehabilitasi indikator ini dapat dihapus)</p>	<p>80%</p> <p>94%</p> <p>97%</p> <p>80%</p> <p>85%</p> <p>85%</p> <p>80%</p> <p>27%</p>

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Keterliban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang dilindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara luntas	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann
		3. Terpenuhiya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah Gedung/Bangunan	1 Unit

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>Rp. 1.923.010.000,-</b>
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 1.923.010.000,-
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 3.932.862.000,-</b>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 3.932.862.000,-

Palangka Raya, 02 Januari 2023

**Pihak Kedua,**  
 Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Tengah



Hendra Ekaputra  
 NIP.197212241993021001

**Pihak Pertama,**  
 Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B  
 Buntok



Suardi  
 NIP.197007241991031001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B BUNTOK  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sinardi


Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Buntok

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Palangka Raya, 02 Januari 2023

Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B  
Buntok

  
Sinardi  
NIP.197007241991031001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA SUBSEKSI PENGELOLAAN  
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B BUNTOK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SAIFUL  
Jabatan : Kepala Subseksi Pengelolaan RUTAN Kelas II B Buntok

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : SINARDI  
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Buntok

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Buntok, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II  
B Buntok



SINARDI  
NIP. 197007241991031001

Pihak Pertama,  
Kepala Subseksi Pengelolaan  
Rutan Kelas IIB Buntok



SAIFUL  
NIP. 197009141991031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA SUBSEKSI PENGELOLAAN  
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B BUNTOK**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	90%
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan	80

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	Indeks Pelayanan Tahanan	80
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	85
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan	85
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan	85

		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan yang aman dan tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat	80

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan	1 Layann
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah Gedung/Bangunan	1 Unit

KEGIATAN	ANGGARAN
Layanan BMN(6231.EBA.956)	Rp. 6.250.000,-
Layanan Hubungan Masyarakat (6231.EBA.958)	Rp. 3.900.000,-
Layanan Umum (6231.EBA..962)	Rp. 14.900.000,-
Layanan Perkantoran (6231.EBA.994)	Rp. 3.605.762.000,-
Layanan Prasarana Internal (6231.EBB.971)	Rp. 192.100.000,-
Layanan Manajemen SDM (6231.EBC.954)	Rp. 25.050.000,-
Layanan Perencanaan dan Penganggaran (6231.EBD.952)	Rp. 21.450.000,-
Layanan Pemantauan dan Evaluasi (6231.EBD.953)	Rp. 20.400.000,-
Layanan Manajemen Keuangan (6231.EBD.955)	Rp. 8.550.000,-
Layanan Reformasi Kinerja (6231.EBD.961)	Rp. 34.500.000,-

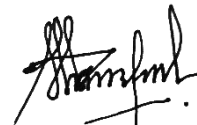
Buntok, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II  
B Buntok



SINARDI  
NIP. 197007241991031001

Pihak Pertama,  
Kepala Subseksi Pengelolaan  
Rutan Kelas IIB Buntok



SAIFUL  
NIP. 197009141991031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA SUBSEKSI PENGELOLAAN  
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B BUNTOK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Saiful

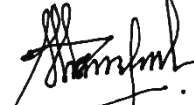
Jabatan : Kepala Subseksi Pengelolaan RUTAN Kelas II B Buntok

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Buntok, 2 Januari 2023

Kepala Subseksi Pengelolaan  
Rutan Kelas IIB Buntok

  
Saiful

NIP. 197009141991031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA SUBSEKSI PELAYANAN TAHANAN  
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B BUNTOK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DHENY RAKHMAN  
Jabatan : Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan RUTAN Kelas II B Buntok

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : SINARDI  
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Buntok

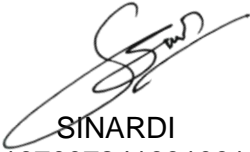
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Buntok, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II  
B Buntok

  
SINARDI  
NIP. 197007241991031001

Pihak Pertama,  
Kepala Subseksi Pelayanan  
Tahanan Rutan Kelas IIB  
Buntok

  
Dheny Rakhman  
NIP. 198611222008011001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA SUBSEKSI PELAYANAN TAHANAN  
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B BUNTOK**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan Kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan Kesehatan maternal	97%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum	90%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	90%
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan	80

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	Indeks Pelayanan Tahanan	80
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	85
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan	85
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan	85
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan yang aman dan tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	80

KEGIATAN	ANGGARAN
Layanan Tahanan (5252.BDC.001)	Rp. 75.649.000,-
Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan (5252.BDC.004)	Rp. 1.796.758.000,-

Pihak Kedua,  
Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II  
B Buntok



SINARDI  
NIP. 197007241991031001

Buntok, 2 Januari 2023  
Pihak Pertama,  
Kepala Subseksi Pelayanan  
Tahanan Rutan Kelas IIB  
Buntok



Dheny Rakhman  
NIP. 198611222008011001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA SUBSEKSI PELAYANAN TAHANAN  
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B BUNTOK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dheny Rakhman

Jabatan : Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan RUTAN Kelas II B Buntok

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Buntok, 2 Januari 2023

Kepala Subseksi Pelayanan  
Tahanan Rutan Kelas IIB  
Buntok

Dheny Rakhman  
NIP. 19861122 200801 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA KESATUAN PENGAMANAN RUTAN  
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B BUNTOK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. NUR  
Jabatan : Kepala Kesatuan Pengamanan RUTAN Kelas II B Buntok

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : SINARDI  
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Buntok


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Buntok, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II  
B Buntok

  
SINARDI  
NIP. 197007241991031001

Pihak Pertama,  
Kepala Kesatuan  
Pengamanan Rutan Kelas  
IIB Buntok

  
M. NUR  
NIP. 196604021990031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA KESATUAN PENGAMANAN RUTAN  
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B BUNTOK**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	90%
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan	80

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	Indeks Pelayanan Tahanan	80
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	85
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan	85
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan	85
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83

3.	Terwujudnya Penyelenggaraan yang aman dan tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	80
----	--	--	----

No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%

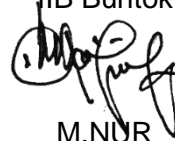
KEGIATAN	ANGGARAN
Layanan Keamanan dan Ketertiban (5252.BHB.002)	Rp.50.603.000,-

Pihak Kedua,  
Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II  
B Buntok



SINARDI  
NIP. 197007241991031001

Buntok, 2 Januari 2023  
Pihak Pertama,  
Kepala Kesatuan  
Pengamanan Rutan Kelas  
JIB Buntok



M. NUR  
NIP. 196604021990031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA KESATUAN PENGAMANAN RUTAN  
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B BUNTOK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. NUR

Jabatan : Kepala Kesatuan Pengamanan RUTAN Kelas II B Buntok

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Buntok, 2 Januari 2023

Kepala Kesatuan  
Pengamanan Rutan Kelas IIB  
Buntok

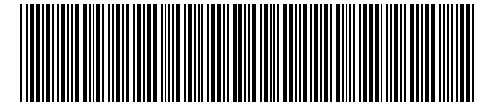
M. Nur

NIP. 196604021990031002

## DIPA AWAL TAHUN ANGGARAN 2023



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : SP DIPA- 013.05.2.408633/2023**



DS:8619-3970-9095-7103

**A. Dasar Hukum:**

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
3. Provinsi : (14) KALIMANTAN TENGAH
4. Kode>Nama Satker : (408633) RUMAH TAHANAN NEGARA BUNTOK
- Sebesar : Rp. 5.855.872.000 ( LIMA MILIAR DELAPAN RATUS LIMA PULUH LIMA JUTA DELAPAN RATUS TUJUH PULUH DUA RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

**Terlampir**

**Terlampir**

Jumlah Uang

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

1. Rupiah Murni	Rp.	5.855.872.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

1. KPPN B U N T O K (080) Rp. 5.855.872.000

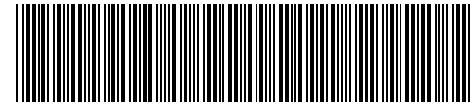
**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 196612301991021001

**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**  
**NOMOR : DIPA- 013.05.2.408633/2023**



DS:8619-3970-9095-7103

Satker : (408633) RUMAH TAHANAN NEGARA BUNTOK

---

03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	Rp.	5.855.872.000
03.03	PEMBINAAN HUKUM	Rp.	3.932.862.000
03.05	LEMBAGA PEMASYARAKATAN	Rp.	1.923.010.000



**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**  
**NOMOR : DIPA- 013.05.2.408633/2023**



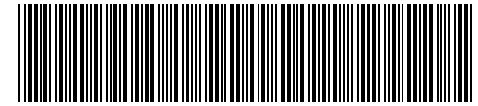
DS:8619-3970-9095-7103

Satker : (408633) RUMAH TAHANAN NEGARA BUNTOK

---

BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	1.923.010.000
BF.5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp.	1.923.010.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	3.932.862.000
WA.6231	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp.	3.932.862.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408633/2023  
I A. INFORMASI KINERJA**



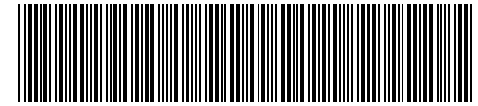
DS:8619-3970-9095-7103

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan  
Provinsi : (14) KALIMANTAN TENGAH  
Kode>Nama Satker : (408633) RUMAH TAHANAN NEGARA BUNTOK

Halaman : I A. 1

Program	: 013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1.923.010.000
Kegiatan	: 5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	1.923.010.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	
	: 2. 01	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	
	: 3. 01	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	
	: 4. 01	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	
	: 5. 01	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	
	: 6. 01	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	
	: 7. 01	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	
	: 8. 01	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	
	: 9. 02	Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	
	: 10. 02	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	
	: 11. 02	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	
	: 12. 02	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap	
	: 13. 02	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	
	: 14. 02	Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	
	: 15. 02	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	
	: 16. 03	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	
	: 17. 03	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	
	: 18. 03	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	
	: 19. 03	Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	
	: 20. 03	Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	
	: 21. 03	persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	
	: 22. 04	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408633/2023  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:8619-3970-9095-7103

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan  
Provinsi : (14) KALIMANTAN TENGAH  
Kode>Nama Satker : (408633) RUMAH TAHANAN NEGARA BUNTOK

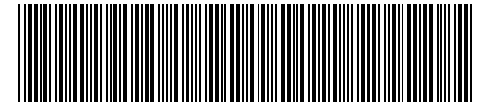
Halaman : I A. 2

Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah

23. 04	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani
24. 04	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal
25. 04	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas
26. 05	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi
27. 05	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
28. 06	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif
29. 06	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
30. 07	Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi
31. 07	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)
32. 08	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika

Klasifikasi Rincian Output	1	:	5252.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	406,00	Orang	1.872.407.000
Rincian Output	:	01	BDC.001	Layanan Tahanan	203.00	Orang	75.649.000
		02	BDC.004	Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	203.00	Orang	1.796.758.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	5252.BHB	Operasi Bidang Keamanan	12,00	operasi, Hari Operasi	50.603.000
Rincian Output	:	01	BHB.002	Layanan Keamanan dan Ketertiban	12.00	operasi	50.603.000
Program	:	013.05.WA		Program Dukungan Manajemen			3.932.862.000
Kegiatan	:	6231		Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan			3.932.862.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01		Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)			
		2. 01		Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu			
		3. 02		Jumlah UPT Pembangunan Rumah Tahanan Negara (Rutan)			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408633/2023  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:8619-3970-9095-7103

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan  
Provinsi : (14) KALIMANTAN TENGAH  
Kode>Nama Satker : (408633) RUMAH TAHANAN NEGARA BUNTOK

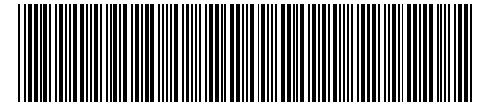
Halaman : I A. 3

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan

- 4. 02 Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan
- 5. 03 Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP)
- 6. 03 Terpenuhi data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan
- 7. 04 Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
- 8. 04 Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
- 9. 05 Jumlah Layanan Perkantoran
- 10. 05 Jumlah UPT Pembangunan Balai Pemasarakatan (Bapas)
- 11. 06 Jumlah Kendaraan Bermotor
- 12. 06 Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan/Bapas/LPKA/Rupbasan
- 13. 07 Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
- 14. 08 Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- 15. 09 Jumlah Gedung/Bangunan

Klasifikasi Rincian Output	1	:	6231.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	3.630.812.000	
Rincian Output		:	01	EBA.956	Layanan BMN	1.00	Layanan	6.250.000
		:	02	EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	1.00	Layanan	3.900.000
		:	03	EBA.962	Layanan Umum	1.00	Layanan	14.900.000
		:	04	EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	3.605.762.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	6231.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1,00	Unit, m2, Paket	192.100.000	
Rincian Output		:	01	EBB.971	Layanan Prasarana Internal	1.00	Unit	192.100.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408633/2023  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:8619-3970-9095-7103

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan  
Provinsi : (14) KALIMANTAN TENGAH  
Kode>Nama Satker : (408633) RUMAH TAHANAN NEGARA BUNTOK

Halaman : I A. 4

Klasifikasi Rincian Output	3	:	6231.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	1,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	25.050.000
Rincian Output		:	01 EBC.954	Layanan Manajemen SDM	1.00	Orang	25.050.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	6231.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	4,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	84.900.000
Rincian Output		:	01 EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.00	Dokumen	21.450.000
		:	02 EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.00	Dokumen	20.400.000
		:	03 EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.00	Dokumen	8.550.000
		:	04 EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	1.00	Dokumen	34.500.000

Jakarta, 30 November 2022  
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.  
Reynhard Silitonga  
NRP 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408633/2023  
I B. SUMBER DANA**



DS:8619-3970-9095-7103

Kementerian Negara/Lembaga	: (013)	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi	: (05)	Ditjen Pemasyarakatan
Provinsi	: (14)	KALIMANTAN TENGAH
Kode>Nama Satker	: (408633)	RUMAH TAHANAN NEGARA BUNTOK

Halaman : I B. 1

					Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2023	Rp.	5.855.872.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	5.855.872.000			(2) RPLN	US\$	0	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0			(2) RHLN	US\$	0	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408633/2023  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:8619-3970-9095-7103

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan  
Provinsi : (14) KALIMANTAN TENGAH  
Kode>Nama Satker : (408633) RUMAH TAHANAN NEGARA BUNTOK  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408633	RUMAH TAHANAN NEGARA BUNTOK	3.142.432	2.521.340	192.100	-	-	5.855.872		
013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	1.923.010	-	-	-	1.923.010		
5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	-	1.923.010	-	-	-	1.923.010		
5252.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (14.03 KALIMANTAN TENGAH / KAB. BARITO SELATAN)	-	1.872.407	-	-	-	1.872.407	14 . 03	
01	RM	-	1.872.407	-	-	-	1.872.407	080	
5252.BHB	Operasi Bidang Keamanan (14.03 KALIMANTAN TENGAH / KAB. BARITO SELATAN)	-	50.603	-	-	-	50.603	14 . 03	
01	RM	-	50.603	-	-	-	50.603	080	
013.05.WA	Program Dukungan Manajemen	3.142.432	598.330	192.100	-	-	3.932.862		
6231	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	3.142.432	598.330	192.100	-	-	3.932.862		
6231.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (14.03 KALIMANTAN TENGAH / KAB. BARITO SELATAN)	3.142.432	488.380	-	-	-	3.630.812	14 . 03	
01	RM	3.142.432	488.380	-	-	-	3.630.812	080	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408633/2023  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:8619-3970-9095-7103

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan  
Provinsi : (14) KALIMANTAN TENGAH  
Kode>Nama Satker : (408633) RUMAH TAHANAN NEGARA BUNTOK  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6231.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (14.03 KALIMANTAN TENGAH / KAB. BARITO SELATAN)	-	-	192.100	-	-	192.100	14 . 03	
01 RM		-	-	192.100	-	-	192.100	080	
6231.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (14.03 KALIMANTAN TENGAH / KAB. BARITO SELATAN)	-	25.050	-	-	-	25.050	14 . 03	
01 RM		-	25.050	-	-	-	25.050	080	
6231.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (14.03 KALIMANTAN TENGAH / KAB. BARITO SELATAN)	-	84.900	-	-	-	84.900	14 . 03	
01 RM		-	84.900	-	-	-	84.900	080	
<b>JUMLAH</b>		<b>3.142.432</b>	<b>2.521.340</b>	<b>192.100</b>	-	-	<b>5.855.872</b>		

Jakarta, 30 November 2022  
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

ttd.  
Reynhard Silitonga  
NRP 67090332



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408633/2023  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:8619-3970-9095-7103

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan  
Provinsi : (14) KALIMANTAN TENGAH  
Kode>Nama Satker : (408633) RUMAH TAHANAN NEGARA BUNTOK

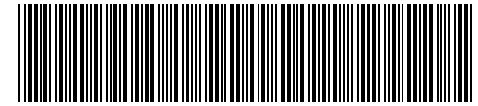
Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408633	<b>RUMAH TAHANAN NEGARA BUNTOK</b>													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	401.516	539.674	660.522	639.776	418.174	446.214	624.458	453.892	424.614	404.124	403.614	439.294	5.855.872
		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	233.082	233.082	233.087	412.935	233.082	233.082	398.647	233.082	233.082	233.082	233.082	233.107	3.142.432
		<b>BELANJA BARANG</b>	168.434	306.592	235.335	226.841	185.092	213.132	225.811	220.810	191.532	171.042	170.532	206.187	2.521.340
		<b>BELANJA MODAL</b>	0	0	192.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192.100
	013.05.BF.5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	132.038	155.634	183.636	201.745	155.796	171.386	156.381	165.496	159.586	142.096	138.036	161.180	1.923.010
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	132.038	155.634	183.636	201.745	155.796	171.386	156.381	165.496	159.586	142.096	138.036	161.180	1.923.010
	013.05.WA.6231	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	269.478	384.040	476.886	438.031	262.378	274.828	468.077	288.396	265.028	262.028	265.578	278.114	3.932.862
		51 BELANJA PEGAWAI	233.082	233.082	233.087	412.935	233.082	233.082	398.647	233.082	233.082	233.082	233.082	233.107	3.142.432
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	36.396	150.958	51.699	25.096	29.296	41.746	69.430	55.314	31.946	28.946	32.496	45.007	598.330
		53 BELANJA MODAL	0	0	192.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192.100
		<b>PERKIRAAN PENERIMAAN</b>	1.183	1.183	1.183	1.183	1.183	1.183	1.183	1.183	1.183	1.183	1.183	1.187	14.200
		- PNPB (425131)	1.183	1.183	1.183	1.183	1.183	1.183	1.183	1.183	1.183	1.183	1.183	1.187	14.200

Jakarta, 30 November 2022  
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.  
Reynhard Silitonga  
NRP 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408633/2023  
IV A. B L O K I R**



DS:8619-3970-9095-7103

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [05] Ditjen Pemasarakatan  
Provinsi : [14] KALIMANTAN TENGAH  
Kode dan Nama Satker : [408633] RUMAH TAHANAN NEGARA BUNTOK

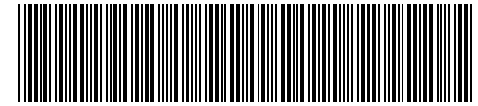
Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022  
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.  
Reynhard Silitonga  
NRP 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408633/2023  
IV B. C A T A T A N**



DS:8619-3970-9095-7103

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [05] Ditjen Pemasarakatan  
Provinsi : [14] KALIMANTAN TENGAH  
Kode dan Nama Satker : [408633] RUMAH TAHANAN NEGARA BUNTOK

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

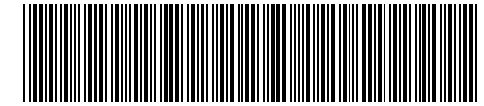
Jakarta, 30 November 2022  
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.  
Reynhard Silitonga  
NRP 67090332

## DIPA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : SP DIPA- 013.05.2.408633/2023**



DS:8784-7812-1329-0812

**Revisi ke 18**  
Tanggal : 12 Desember 2023

**A. Dasar Hukum:**

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

- |                               |            |  |
|-------------------------------|------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013)    | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI   |
| 2. Unit Organisasi            | : (05)     | Ditjen Pemasarakatan   |
| 3. Provinsi                   | : (14)     | KALIMANTAN TENGAH  |
| 4. Kode>Nama Satker           | : (408633) | RUMAH TAHANAN NEGARA BUNTOK  |
| Sebesar                       | : Rp.      | 5.982.378.000 ( LIMA MILIAR SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH DUA JUTA TIGA RATUS TUJUH PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH ) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

**Terlampir**

**Terlampir**

Jumlah Uang

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

1. Rupiah Murni	Rp.	5.982.378.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

- |                |           |               |
|----------------|-----------|---------------|
| 1. KPPN BUNTOK | (080) Rp. | 5.982.378.000 |
|----------------|-----------|---------------|

**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 196612301991021001

**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**  
**NOMOR : DIPA- 013.05.2.408633/2023**



DS:8784-7812-1329-0812

Satker : (408633) RUMAH TAHANAN NEGARA BUNTOK

---

03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	Rp.	5.982.378.000
03.03	PEMBINAAN HUKUM	Rp.	4.228.719.000
03.05	LEMBAGA PEMASYARAKATAN	Rp.	1.753.659.000

**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**  
**NOMOR : DIPA- 013.05.2.408633/2023**



DS:8784-7812-1329-0812

Satker : (408633) RUMAH TAHANAN NEGARA BUNTOK

---

BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	1.753.659.000
BF.5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp.	1.753.659.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	4.228.719.000
WA.6231	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp.	4.228.719.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408633/2023  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:8784-7812-1329-0812

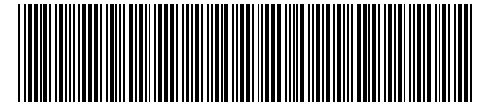
Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan  
Provinsi : (14) KALIMANTAN TENGAH  
Kode>Nama Satker : (408633) RUMAH TAHANAN NEGARA BUNTOK

Halaman : I A. 1

Program	:	013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			1.753.659.000
Kegiatan	:	5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah			1.753.659.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 04	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal			
Klasifikasi Rincian Output	1	:	5252.BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	406,00	Orang	1.701.823.000
Rincian Output	:	01	BDC.001 Layanan Tahanan	203,00	Orang	98.289.000
		02	BDC.004 Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	203,00	Orang	1.603.534.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	5252.BHB Operasi Bidang Keamanan	12,00	operasi, Hari Operasi	51.836.000
Rincian Output	:	01	BHB.002 Layanan Keamanan dan Ketertiban	12,00	operasi	51.836.000
Program	:	013.05.WA	Program Dukungan Manajemen			4.228.719.000
Kegiatan	:	6231	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan			4.228.719.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 09	Jumlah Gedung/Bangunan			
Klasifikasi Rincian Output	1	:	6231.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	4,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	3.931.807.000
Rincian Output	:	01	EBA.956 Layanan BMN	1,00	Layanan	6.250.000
		02	EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat	1,00	Layanan	3.900.000
		03	EBA.962 Layanan Umum	1,00	Layanan	10.939.000
		04	EBA.994 Layanan Perkantoran	1,00	Layanan	3.910.718.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	6231.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1,00	Unit, m2, Paket	192.100.000
Rincian Output	:	01	EBB.971 Layanan Prasarana Internal	1,00	Unit	192.100.000



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408633/2023  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:8784-7812-1329-0812

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan  
Provinsi : (14) KALIMANTAN TENGAH  
Kode>Nama Satker : (408633) RUMAH TAHANAN NEGARA BUNTOK

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	3	:	6231.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	1,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	25.050.000	
Rincian Output		:	01	EBC.954	Layanan Manajemen SDM	1.00	Orang	25.050.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	6231.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	4,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	79.762.000	
Rincian Output		:	01	EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.00	Dokumen	26.350.000
		:	02	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.00	Dokumen	18.000.000
		:	03	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.00	Dokumen	8.200.000
		:	04	EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	1.00	Dokumen	27.212.000

Jakarta, 30 November 2022  
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.  
Reynhard Silitonga  
NRP 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408633/2023  
I B. SUMBER DANA**



DS:8784-7812-1329-0812

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan  
Provinsi : (14) KALIMANTAN TENGAH  
Kode>Nama Satker : (408633) RUMAH TAHANAN NEGARA BUNTOK

Halaman : I B. 1

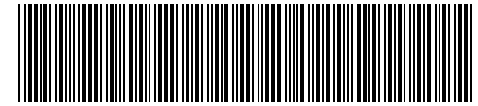
1. Anggaran Tahun 2023	Rp.	5.982.378.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0	
1. Rupiah Murni	Rp.	5.982.378.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0	
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0	
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0	
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0			
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0			
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0			
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0			

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408633/2023  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:8784-7812-1329-0812

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan  
Provinsi : (14) KALIMANTAN TENGAH  
Kode>Nama Satker : (408633) RUMAH TAHANAN NEGARA BUNTOK  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408633	RUMAH TAHANAN NEGARA BUNTOK	3.423.590	2.366.688	192.100	-	-	5.982.378		
013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	1.753.659	-	-	-	1.753.659		
5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	-	1.753.659	-	-	-	1.753.659		
5252.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (14.03 KALIMANTAN TENGAH / KAB. BARITO SELATAN)	-	1.701.823	-	-	-	1.701.823	14 . 03	
01	RM	-	1.701.823	-	-	-	1.701.823	080	
5252.BHB	Operasi Bidang Keamanan (14.03 KALIMANTAN TENGAH / KAB. BARITO SELATAN)	-	51.836	-	-	-	51.836	14 . 03	
01	RM	-	51.836	-	-	-	51.836	080	
013.05.WA	Program Dukungan Manajemen	3.423.590	613.029	192.100	-	-	4.228.719		
6231	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	3.423.590	613.029	192.100	-	-	4.228.719		
6231.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (14.03 KALIMANTAN TENGAH / KAB. BARITO SELATAN)	3.423.590	508.217	-	-	-	3.931.807	14 . 03	
01	RM	3.423.590	508.217	-	-	-	3.931.807	080	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408633/2023  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:8784-7812-1329-0812

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan  
Provinsi : (14) KALIMANTAN TENGAH  
Kode>Nama Satker : (408633) RUMAH TAHANAN NEGARA BUNTOK  
Kewenangan : (KD)

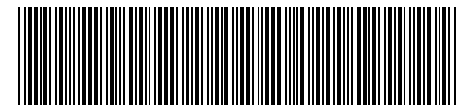
Halaman : II. 2  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6231.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (14.03 KALIMANTAN TENGAH / KAB. BARITO SELATAN)	-	-	192.100	-	-	192.100	14 . 03	
01 RM		-	-	192.100	-	-	192.100	080	
6231.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (14.03 KALIMANTAN TENGAH / KAB. BARITO SELATAN)	-	25.050	-	-	-	25.050	14 . 03	
01 RM		-	25.050	-	-	-	25.050	080	
6231.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (14.03 KALIMANTAN TENGAH / KAB. BARITO SELATAN)	-	79.762	-	-	-	79.762	14 . 03	
01 RM		-	79.762	-	-	-	79.762	080	
<b>JUMLAH</b>		<b>3.423.590</b>	<b>2.366.688</b>	<b>192.100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.982.378</b>		

Jakarta, 30 November 2022  
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

ttd.  
Reynhard Silitonga  
NRP 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408633/2023  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:8784-7812-1329-0812

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan  
Provinsi : (14) KALIMANTAN TENGAH  
Kode>Nama Satker : (408633) RUMAH TAHANAN NEGARA BUNTOK

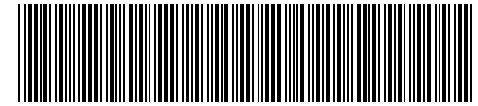
Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408633	<b>RUMAH TAHANAN NEGARA BUNTOK</b>													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	219.842	452.247	570.362	696.693	462.007	755.049	448.955	455.684	420.796	442.055	402.318	656.370	5.982.378
		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	202.957	248.725	239.302	461.892	270.781	447.803	251.711	245.946	244.726	242.712	245.000	322.036	3.423.590
		<b>BELANJA BARANG</b>	16.884	203.522	273.587	234.801	191.227	173.141	197.244	209.738	176.071	199.343	157.318	333.813	2.366.688
		<b>BELANJA MODAL</b>	0	0	57.474	0	0	134.105	0	0	0	0	0	521	192.100
	013.05.BF.5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	0	127.104	222.611	128.464	121.244	133.456	140.897	161.049	132.217	167.752	130.918	287.947	1.753.659
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	127.104	222.611	128.464	121.244	133.456	140.897	161.049	132.217	167.752	130.918	287.947	1.753.659
	013.05.WA.6231	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	219.842	325.143	347.751	568.230	340.763	621.593	308.058	294.635	288.579	274.303	271.399	368.423	4.228.719
		51 BELANJA PEGAWAI	202.957	248.725	239.302	461.892	270.781	447.803	251.711	245.946	244.726	242.712	245.000	322.036	3.423.590
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	16.884	76.418	50.975	106.337	69.983	39.685	56.347	48.689	43.853	31.591	26.399	45.867	613.029
		53 BELANJA MODAL	0	0	57.474	0	0	134.105	0	0	0	0	0	521	192.100
		<b>PERKIRAAN PENERIMAAN</b>	1.183	1.183	1.183	1.183	1.183	1.183	1.183	1.183	1.183	1.183	1.183	1.187	14.200
		- PNPB (425131)	1.183	1.183	1.183	1.183	1.183	1.183	1.183	1.183	1.183	1.183	1.183	1.187	14.200

Jakarta, 30 November 2022  
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

ttd.  
Reynhard Silitonga  
NRP 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408633/2023  
IV A. B L O K I R**



DS:8784-7812-1329-0812

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [05] Ditjen Pemasarakatan  
Provinsi : [14] KALIMANTAN TENGAH  
Kode dan Nama Satker : [408633] RUMAH TAHANAN NEGARA BUNTOK

Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022  
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.  
Reynhard Silitonga  
NRP 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408633/2023  
IV B. C A T A T A N**



DS:8784-7812-1329-0812

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [05] Ditjen Pemasarakatan  
Provinsi : [14] KALIMANTAN TENGAH  
Kode dan Nama Satker : [408633] RUMAH TAHANAN NEGARA BUNTOK

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022  
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.  
Reynhard Silitonga  
NRP 67090332

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**



## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2023

**Kementerian** : 013 **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**Unit Organisasi** : 05 **DITJEN PEMASYARAKATAN**  
**Satuan Kerja** : 408633 **RUMAH TAHANAN NEGARA BUNTOK**

Hal 1 dari 6

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>5,982,378,000</b>	<b>0</b>	<b>5,328,901,447</b>	<b>544,752,253</b>	<b>5,873,653,700</b>	<b>98.18 %</b>	<b>108,724,300</b>
BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1,753,659,000	0	1,472,624,553	269,241,523	1,741,866,076	99.33 %	11,792,924
BF.5252 Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	1,753,659,000	0	1,472,624,553	269,241,523	1,741,866,076	99.33 %	11,792,924
BDC Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat	1,701,823,000	0	1,423,846,303	266,186,523	1,690,032,826	99.31 %	11,790,174
BDC.001 Layanan Tahanan	98,289,000	0	93,149,000	5,140,000	98,289,000	100.00	0
051 Administrasi Tahanan	39,105,000	0	36,805,000	2,300,000	39,105,000	100.00	0
051.0A Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan	12,600,000	0	11,100,000	1,500,000	12,600,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	12,600,000	0	11,100,000	1,500,000	12,600,000	100.00	0
051.0B Pemberian Remisi, PB, CB, CMB, CMK	26,505,000	0	25,705,000	800,000	26,505,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	19,265,000	0	19,265,000	0	19,265,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,400,000	0	5,600,000	800,000	6,400,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	840,000	0	840,000	0	840,000	100.00	0
052 Pembimbingan Kegiatan Tahanan	59,184,000	0	56,344,000	2,840,000	59,184,000	100.00	0
052.0A Kegiatan Keagamaan	29,990,000	0	27,150,000	2,840,000	29,990,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	7,590,000	0	6,250,000	1,340,000	7,590,000	100.00	0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	7,250,000	0	7,250,000	0	7,250,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15,150,000	0	13,650,000	1,500,000	15,150,000	100.00	0
052.0B Kegiatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara	11,724,000	0	11,724,000	0	11,724,000	100.00	0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	11,724,000	0	11,724,000	0	11,724,000	100.00	0
052.0C Kegiatan Kesenian dan Olahraga	17,470,000	0	17,470,000	0	17,470,000	100.00	0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	17,470,000	0	17,470,000	0	17,470,000	100.00	0
BDC.004 Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	1,603,534,000	0	1,330,697,303	261,046,523	1,591,743,826	99.26 %	11,790,174
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	1,603,534,000	0	1,330,697,303	261,046,523	1,591,743,826	99.26 %	11,790,174
005.0A Pengadaan Bahan Makan Warga Binaan Pemasyarakatan	1,386,644,000	0	1,134,737,303	240,201,523	1,374,938,826	99.16 %	11,705,174
521112 Belanja Pengadaan Bahan Makanan	1,386,644,000	0	1,134,737,303	240,201,523	1,374,938,826	99.16 %	11,705,174

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2023

**Kementerian** : 013 **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**Unit Organisasi** : 05 **DITJEN PEMASYARAKATAN**  
**Satuan Kerja** : 408633 **RUMAH TAHANAN NEGARA BUNTOK**

Hal 2 dari 6

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
005.0B Kebutuhan Sandang	40,000,000	0	39,915,000	0	39,915,000	99.79 %	85,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	40,000,000	0	39,915,000	0	39,915,000	99.79 %	85,000
005.0C Pemenuhan sarana Makan dan Minum	37,800,000	0	37,800,000	0	37,800,000	100.00	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	37,800,000	0	37,800,000	0	37,800,000	100.00	0
005.0D Pemenuhan Perlengkapan Mandi	21,000,000	0	21,000,000	0	21,000,000	100.00	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	21,000,000	0	21,000,000	0	21,000,000	100.00	0
005.0E Perlengkapan Khusus Kelompok renta	38,130,000	0	23,375,000	14,755,000	38,130,000	100.00	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	38,130,000	0	23,375,000	14,755,000	38,130,000	100.00	0
005.0F Extra Fooding	28,500,000	0	28,500,000	0	28,500,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	28,500,000	0	28,500,000	0	28,500,000	100.00	0
005.0I Perlengkapan Medis Poliklinik	39,585,000	0	33,495,000	6,090,000	39,585,000	100.00	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	39,585,000	0	33,495,000	6,090,000	39,585,000	100.00	0
005.0J Penanganan dan Pencegahan Covid-19	11,875,000	0	11,875,000	0	11,875,000	100.00	0
521841 Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	11,875,000	0	11,875,000	0	11,875,000	100.00	0
<b>BHB Operasi Bidang Keamanan</b>	<b>51,836,000</b>	<b>0</b>	<b>48,778,250</b>	<b>3,055,000</b>	<b>51,833,250</b>	<b>99.99 %</b>	<b>2,750</b>
<b>BHB.002 Layanan Keamanan dan Ketertiban</b>	<b>51,836,000</b>	<b>0</b>	<b>48,778,250</b>	<b>3,055,000</b>	<b>51,833,250</b>	<b>99.99 %</b>	<b>2,750</b>
<b>051 Penegakan Keamanan dan Ketertiban</b>	<b>33,836,000</b>	<b>0</b>	<b>32,578,250</b>	<b>1,255,000</b>	<b>33,833,250</b>	<b>99.99 %</b>	<b>2,750</b>
051.0A Penegakan dan Keamanan dan Ke	33,836,000	0	32,578,250	1,255,000	33,833,250	99.99 %	2,750
521211 Belanja Bahan	5,933,000	0	4,678,000	1,255,000	5,933,000	100.00	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	27,903,000	0	27,900,250	0	27,900,250	99.99 %	2,750
<b>052 Pengawalan</b>	<b>18,000,000</b>	<b>0</b>	<b>16,200,000</b>	<b>1,800,000</b>	<b>18,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>
052.0A Pengawalan Narapidana	3,000,000	0	1,200,000	1,800,000	3,000,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,000,000	0	1,200,000	1,800,000	3,000,000	100.00	0
052.0B Perpindahan (Mutasi) Narapidana	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	100.00	0
WA Program Dukungan Manajemen	4,228,719,000	0	3,856,276,894	275,510,730	4,131,787,624	97.71 %	96,931,376

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2023

**Kementerian** : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**Unit Organisasi** : 05 DITJEN PEMASYARAKATAN  
**Satuan Kerja** : 408633 RUMAH TAHANAN NEGARA BUNTOK

Hal 3 dari 6

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
WA.6231 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	4,228,719,000	0	3,856,276,894	275,510,730	4,131,787,624	97.71 %	96,931,376
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	3,931,807,000	0	3,560,497,834	275,160,730	3,835,658,564	97.55 %	96,148,436
EBA.956 Layanan BMN	6,250,000	0	6,250,000	0	6,250,000	100.00	0
051 Penatausahaan dan Pengelolaan BMN	6,250,000	0	6,250,000	0	6,250,000	100.00	0
051.0A Penatausahaan dan Pengeloaan BMN	6,250,000	0	6,250,000	0	6,250,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	1,550,000	0	1,550,000	0	1,550,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,700,000	0	4,700,000	0	4,700,000	100.00	0
EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat	3,900,000	0	3,900,000	0	3,900,000	100.00	0
051 Penyediaan Informasi Publik	3,900,000	0	3,900,000	0	3,900,000	100.00	0
051.0A Penyediaan Informasi Publik	3,900,000	0	3,900,000	0	3,900,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	3,900,000	0	3,900,000	0	3,900,000	100.00	0
EBA.962 Layanan Umum	10,939,000	0	10,750,000	89,000	10,839,000	99.09 %	100,000
051 Urusan Umum	10,939,000	0	10,750,000	89,000	10,839,000	99.09 %	100,000
051.0A Urusan Umu	10,939,000	0	10,750,000	89,000	10,839,000	99.09 %	100,000
521211 Belanja Bahan	2,489,000	0	2,400,000	89,000	2,489,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7,700,000	0	7,600,000	0	7,600,000	98.70 %	100,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750,000	0	750,000	0	750,000	100.00	0
EBA.994 Layanan Perkantoran	3,910,718,000	0	3,539,597,834	275,071,730	3,814,669,564	97.54 %	96,048,436
001 Gaji dan Tunjangan	3,423,590,000	0	3,091,344,631	236,516,680	3,327,861,311	97.20 %	95,728,689
001.0A Pembayaran Gaji dan Tunjangan	3,400,214,000	0	3,072,049,631	232,491,680	3,304,541,311	97.19 %	95,672,689
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	2,299,972,000	0	2,114,410,240	152,944,900	2,267,355,140	98.58 %	32,616,860
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	57,000	0	51,079	3,378	54,457	95.54 %	2,543
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	123,803,000	0	114,090,846	8,682,870	122,773,716	99.17 %	1,029,284
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	33,921,000	0	31,352,534	2,343,054	33,695,588	99.34 %	225,412
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	42,220,000	0	29,160,000	2,340,000	31,500,000	74.61 %	10,720,000
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS	167,991,000	0	154,325,000	12,590,000	166,915,000	99.36 %	1,076,000

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2023

**Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**

**Unit Organisasi : 05 DITJEN PEMASYARAKATAN**

**Satuan Kerja : 408633 RUMAH TAHANAN NEGARA BUNTOK**

Hal 4 dari 6

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
511125 Belanja Tunj. PPh PNS	1,685,000	0	1,352,752	329,398	1,682,150	99.83 %	2,850
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	131,515,000	0	121,593,180	8,980,080	130,573,260	99.28 %	941,740
511129 Belanja Uang Makan PNS	584,085,000	0	490,749,000	44,278,000	535,027,000	91.60 %	49,058,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	14,965,000	0	14,965,000	0	14,965,000	100.00	0
001.0B Uang Lembur	23,376,000	0	19,295,000	4,025,000	23,320,000	99.76 %	56,000
512211 Belanja Uang Lembur	23,376,000	0	19,295,000	4,025,000	23,320,000	99.76 %	56,000
<b>002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor</b>	<b>487,128,000</b>	<b>0</b>	<b>448,253,203</b>	<b>38,555,050</b>	<b>486,808,253</b>	<b>99.93 %</b>	<b>319,747</b>
002.0A Kesehatan Pegawai	1,775,000	0	1,775,000	0	1,775,000	100.00	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,775,000	0	1,775,000	0	1,775,000	100.00	0
002.0C Pemeliharaan Gedung	96,281,000	0	96,278,000	0	96,278,000	100.00	3,000
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	84,278,000	0	84,278,000	0	84,278,000	100.00	0
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12,003,000	0	12,000,000	0	12,000,000	99.98 %	3,000
002.0D Pemeliharaan Peralatan Perkantoran	24,500,000	0	24,500,000	0	24,500,000	100.00	0
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	24,500,000	0	24,500,000	0	24,500,000	100.00	0
002.0E Pemeliharaan Kendaraan	38,000,000	0	38,000,000	0	38,000,000	100.00	0
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	38,000,000	0	38,000,000	0	38,000,000	100.00	0
002.0F Langganan Daya dan Jasa	153,067,000	0	136,550,203	16,451,050	153,001,253	99.96 %	65,747
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	19,500,000	0	16,250,000	3,250,000	19,500,000	100.00	0
522111 Belanja Langganan Listrik	120,108,000	0	107,755,803	12,287,050	120,042,853	99.95 %	65,147
522113 Belanja Langganan Air	13,459,000	0	12,544,400	914,000	13,458,400	100.00	600
002.0G Jasa POS	1,800,000	0	1,530,000	270,000	1,800,000	100.00	0
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,800,000	0	1,530,000	270,000	1,800,000	100.00	0
002.0H Keperluan Perkantoran	40,067,000	0	33,902,000	6,164,000	40,066,000	100.00	1,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	40,067,000	0	33,902,000	6,164,000	40,066,000	100.00	1,000
002.0I Konsultasi dan Koordinasi	26,500,000	0	26,250,000	0	26,250,000	99.06 %	250,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26,500,000	0	26,250,000	0	26,250,000	99.06 %	250,000

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2023

**Kementerian** : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**Unit Organisasi** : 05 DITJEN PEMASYARAKATAN  
**Satuan Kerja** : 408633 RUMAH TAHANAN NEGARA BUNTOK

Hal 5 dari 6

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
002.0J Jamuan Tamu	7,818,000	0	7,818,000	0	7,818,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	7,818,000	0	7,818,000	0	7,818,000	100.00	0
002.0K Honorarium Oprasional Satuan Kerja	49,800,000	0	41,500,000	8,300,000	49,800,000	100.00	0
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	49,800,000	0	41,500,000	8,300,000	49,800,000	100.00	0
002.0L Penambahan Daya Tahan Tubuh	47,520,000	0	40,150,000	7,370,000	47,520,000	100.00	0
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	47,520,000	0	40,150,000	7,370,000	47,520,000	100.00	0
<b>EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal</b>	<b>192,100,000</b>	<b>0</b>	<b>191,579,060</b>	<b>0</b>	<b>191,579,060</b>	<b>99.73 %</b>	<b>520,940</b>
<b>EBB.971 Layanan Prasarana Internal</b>	<b>192,100,000</b>	<b>0</b>	<b>191,579,060</b>	<b>0</b>	<b>191,579,060</b>	<b>99.73 %</b>	<b>520,940</b>
<b>051 Gedung dan Bangunan</b>	<b>192,100,000</b>	<b>0</b>	<b>191,579,060</b>	<b>0</b>	<b>191,579,060</b>	<b>99.73 %</b>	<b>520,940</b>
051.0A Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Unit Pelaksana Teknis Masyarakat	192,100,000	0	191,579,060	0	191,579,060	99.73 %	520,940
533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	192,100,000	0	191,579,060	0	191,579,060	99.73 %	520,940
<b>EBC Layanan Manajemen SDM Internal</b>	<b>25,050,000</b>	<b>0</b>	<b>25,050,000</b>	<b>0</b>	<b>25,050,000</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>
<b>EBC.954 Layanan Manajemen SDM</b>	<b>25,050,000</b>	<b>0</b>	<b>25,050,000</b>	<b>0</b>	<b>25,050,000</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>
<b>051 Pembinaan Kepegawaian</b>	<b>25,050,000</b>	<b>0</b>	<b>25,050,000</b>	<b>0</b>	<b>25,050,000</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>
051.0A Pembinaan Fisik Mental dan Disiplin (FMD)	25,050,000	0	25,050,000	0	25,050,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	810,000	0	810,000	0	810,000	100.00	0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	18,200,000	0	18,200,000	0	18,200,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	6,040,000	0	6,040,000	0	6,040,000	100.00	0
<b>EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal</b>	<b>79,762,000</b>	<b>0</b>	<b>79,150,000</b>	<b>350,000</b>	<b>79,500,000</b>	<b>99.67 %</b>	<b>262,000</b>
<b>EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran</b>	<b>26,350,000</b>	<b>0</b>	<b>25,900,000</b>	<b>350,000</b>	<b>26,250,000</b>	<b>99.62 %</b>	<b>100,000</b>
<b>051 Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran</b>	<b>26,350,000</b>	<b>0</b>	<b>25,900,000</b>	<b>350,000</b>	<b>26,250,000</b>	<b>99.62 %</b>	<b>100,000</b>
051.0A Penyusunan RKAKL	26,350,000	0	25,900,000	350,000	26,250,000	99.62 %	100,000
521211 Belanja Bahan	5,450,000	0	5,100,000	350,000	5,450,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20,900,000	0	20,800,000	0	20,800,000	99.52 %	100,000
<b>EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi</b>	<b>18,000,000</b>	<b>0</b>	<b>17,850,000</b>	<b>0</b>	<b>17,850,000</b>	<b>99.17 %</b>	<b>150,000</b>
<b>051 Penyusunan Laporan Kinerja</b>	<b>18,000,000</b>	<b>0</b>	<b>17,850,000</b>	<b>0</b>	<b>17,850,000</b>	<b>99.17 %</b>	<b>150,000</b>

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi : 05 DITJEN PEMASYARAKATAN

Satuan Kerja : 408633 RUMAH TAHANAN NEGARA BUNTOK

Hal 6 dari 6

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
051.0A Penyusunan Laporan Kinerja	18,000,000	0	17,850,000	0	17,850,000	99.17 %	150,000
521211 Belanja Bahan	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16,400,000	0	16,250,000	0	16,250,000	99.09 %	150,000
<b>EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan</b>	<b>8,200,000</b>	<b>0</b>	<b>8,200,000</b>	<b>0</b>	<b>8,200,000</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>
051 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	8,200,000	0	8,200,000	0	8,200,000	100.00	0
051.0A Pengelola Sistem Akutansi	8,200,000	0	8,200,000	0	8,200,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	2,050,000	0	2,050,000	0	2,050,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,350,000	0	4,350,000	0	4,350,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0
<b>EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja</b>	<b>27,212,000</b>	<b>0</b>	<b>27,200,000</b>	<b>0</b>	<b>27,200,000</b>	<b>99.96 %</b>	<b>12,000</b>
051 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM)	27,212,000	0	27,200,000	0	27,200,000	99.96 %	12,000
051.0A Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	27,212,000	0	27,200,000	0	27,200,000	99.96 %	12,000
521211 Belanja Bahan	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24,712,000	0	24,700,000	0	24,700,000	99.95 %	12,000

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

**DOKUMENTASI/FOTO**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**



**DOKUMENTASI PENERIMAAN PENGHARGAAN TAHUN 2023**





**DOKUMENTASI KEGIATAN PERKANTORAN RAPAT INTERNAL, KEGIATAN PADA KANWIL KUMHAM KALTENG, DAN KOORDINASI DENGAN PEMDA**





**Layanan Kunjungan bagi WBP dan Penitipan bagi WBP**





## DOKUMENTASI PEMBINAAN KEAGAMAAN



**DOKUMENTASI ASIMILASI UNTUK WBP**



## DOKUMENTASI RENOVASI/REHABILITASI LISTRIK



**DOKUMENTASI PENGECEKAN SENPI**





## DOKUMENTASI KAMTIB





**DOKUMENTASI PELAYANAN KESEHATAN DAN LINGKUNGAN HUNIAN**



**DOKUMENTASI PEMBINAAN WBP**







**DOKUMENTASI PEMERIKSAAN TRANSFERAN BARANG MILIK NEGARA**

